

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Sidoarjo

1. Sejarah Kabupaten Sidoarjo

Berdasarkan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (2016:5), terbentuknya Kabupaten Sidoarjo diawali pada tahun 1019-1042 di Jawa Timur terdapat sebuah kerajaan bernama Jawa Timur yang dipimpin oleh seorang raja bernama Airlangga. Selama kepemimpinan raja Airlangga kerajaan berkembang sangat pesat. Saat akhir masa kepemimpinannya tepatnya tahun 1042, raja Airlangga membagi kerajaan menjadi dua bagian untuk dibagikan pada kedua anaknya. Kerajaan tersebut diberi nama kerajaan Daha dan kerajaan Jenggala.

Kerajaan Jenggala terletak di daerah Delta Brantas yang meliputi daerah pesisir utara dengan pusat pemerintahan di sekitar Gedangan Sidoarjo. Daerah Delta Brantas merupakan jalur perdagangan yang sangat strategis. Hal ini sangat menguntungkan kerajaan Jenggala karena dapat menguasai bandar-bandar dan muara sungai besar untuk menjual kekayaan alamnya. Sementara itu, kerajaan Daha terletak di Kediri yang tidak terdapat laut maupun bandar. Ketimpangan inilah yang menjadi asal mula terjadinya perang saudara antara kerajaan Daha dan kerajaan Jenggala.

Kerajaan Daha menyerang kerajaan Jenggala untuk merebut kekuasaan daerah Delta Brantas. Perang tersebut berakhir dengan kekalahan kerajaan Jenggala pada tahun 1045. Kekalahan kerajaan Jenggala menyebabkan

penguasaan daerah Delta Brantas beralih ke kerajaan Daha. Daerah Delta Brantas dikuasai oleh kerajaan Daha hingga tahun 1850.

Selanjutnya, pada tahun 1851, daerah Delta Brantas berhasil dikuasai oleh kolonial Belanda. Belanda memberi nama daerah Delta Brantas dengan sebutan “Sidokare” yang merupakan bagian dari kabupaten Surabaya. Sidokare dipimpin oleh seorang patih bernama R. Ng. Djojohardjo dan dibantu oleh seorang wedana bernama Bagus Ranuwiryo. Tahun 1859, berdasarkan Keputusan Pemerintah Hindia Belanda Nomor 9/1859 tanggal 31 Januari 1859 *Staatsblad* Nomor 6, daerah Kabupaten Surabaya dibagi menjadi dua bagian yaitu Kabupaten Surabaya dan Kabupaten Sidokare. Sejak saat itu, Kabupaten Sidokare tidak lagi menjadi daerah bagian dari Kabupaten Surabaya. Bupati pertama yang ditunjuk sebagai pemimpin Kabupaten Sidokare yaitu R. Notopuro dengan gelar R.T.P Tjokronegoro I yang merupakan anak Bupati Surabaya.

Kemudian, pada tahun yang sama Belanda mengeluarkan Surat Keputusan Pemerintah Hindia Belanda Nomor 10/1859 tanggal 28 Mei 1859 *Staatsblad* 1859. Berdasarkan keputusan tersebut nama Kabupaten Sidokare berubah menjadi Kabupaten Sidoarjo, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara resmi terbentuknya Kabupaten Sidoarjo yaitu tanggal 28 Mei 1859 dan sebagai Bupati pertama yang diangkat sebagai pemimpin Kabupaten Sidoarjo adalah R. Notopuro dengan gelar R.T.P Tjokronegoro I.

2. Visi dan Misi Kabupaten Sidoarjo

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam menyelenggarakan

pemerintahannya menetapkan visi sebagai arah bagi perjalanan pemerintah selama lima tahun ke depan. Visi Kabupaten Sidoarjo yang tertuang dalam Rencana Kerja Jangka Panjang Daerah tahun 2016-2021 adalah “Mewujudkan Kabupaten Sidoarjo yang Inovatif, Mandiri, Sejahtera, dan Berkelanjutan”.

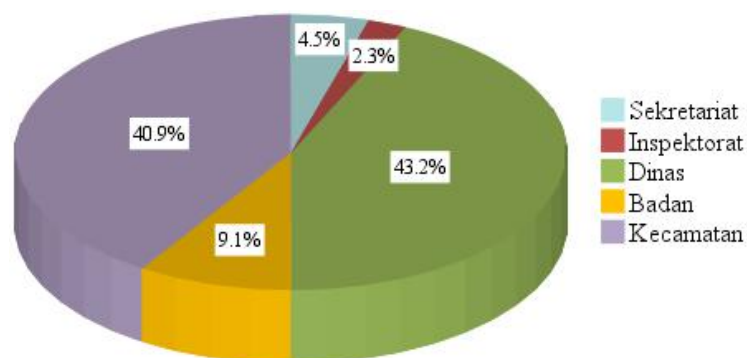
Visi tersebut dijabarkan dalam misi Kabupaten Sidoarjo, yang terdiri dari:

- a. Pemerintah yang bersih dan akuntabel melalui penyelenggaraan pemerintah yang inovatif, aspiratif, partisipatif dan transparan.
- b. Meningkatnya perekonomian daerah melalui optimalisasi potensi basis industri pengolahan, pertanian, perikanan, pariwisata, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan koperasi serta pemberdayaan masyarakat.
- c. Meningkatnya kualitas dan standar pelayanan pendidikan dan kesehatan.
- d. Meningkatnya tatanan kehidupan masyarakat yang berbudaya dan berakhlakul karimah kepada Tuhan yang Maha Esa, serta dapat memelihara kerukunan, ketentraman, dan ketertiban.
- e. Infrastruktur publik yang memadai dan berkualitas sebagai penunjang pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.

3. Ruang Lingkup Instansi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam melaksanakan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik membentuk beberapa instansi perangkat daerah dengan tugas pokok dan fungsi yang berbeda-beda. Susunan instansi perangkat daerah Kabupaten Sidoarjo ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo sebagaimana diubah terakhir dalam Peraturan

Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo. Sebagian besar instansi perangkat daerah di Kabupaten Sidoarjo berbentuk dinas yaitu sebanyak 19 instansi (43,2%). Selanjutnya, berbentuk kecamatan sebanyak 18 instansi (40,9%), berbentuk badan sebanyak 4 instansi (9,1%), berbentuk sekretariat sebanyak 2 instansi (4,5%), dan sisanya berbentuk inspektorat sebanyak 1 instansi (2,3%). Persentase bentuk instansi perangkat daerah Kabupaten Sidoarjo dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 3. Persentase Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo

(Hasil Komputerisasi, Penulis, 2018).

Berikut ini disajikan nama dan alamat instansi perangkat daerah di Kabupaten Sidoarjo:

Tabel 10 Daftar Instansi Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo

No.	Nama Instansi Perangkat Daerah	Alamat
1	Sekretariat Daerah	Jl. Gubernur Suryo No. 1 Sidoarjo
2	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat	Jl. Sultan Agung No. 39 Sidoarjo
3	Inspektorat Daerah	Jl. Diponegoro No. 139 Sidoarjo
4	Dinas Pendidikan	Jl. Pahlawan No. 4 Sidoarjo

Lanjutan Tabel 10. Daftar Instansi Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo

No.	Nama Instansi Perangkat Daerah	Alamat
5	Dinas Pangan dan Pertanian	Jl. Pahlawan KM. 2 Sidoarjo
6	Dinas Kesehatan	Jl. Untung Suropati No. 4 Sidoarjo
7	Satuan Polisi Pamong Praja	Jl. Kombes Pol M. Duryat No. 62 Sidoarjo
8	Dinas Perumahan dan Permukiman	Jl. Sultan Agung No. 17A Sidoarjo
9	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jl. Ahmad Yani No. 4 Sidoarjo
10	Dinas Komunikasi dan Informatika	Jl. Gubernur Suryo No. 1 Sidoarjo
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jl. Sultan Agung No. 23 Sidoarjo
12	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Jl. Jaksa Agung Suprpto No. 5 Sidoarjo
13	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Jl. Untung Suropati No. 31 Sidoarjo
14	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jl. Jaksa Agung Suprpto No. 9 Sidoarjo
15	Dinas Perikanan	Jl. Sultan Agung No. 28 Sidoarjo
16	Dinas Perhubungan	Jl. Raya Candi No. 107 Candi
17	Dinas Tenaga Kerja	Jl. Raya Jati No. 4 Sidoarjo
18	Dinas Sosial	Jl. Pahlawan No. 45 Sidoarjo
19	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	Jl. Sultan Agung No. 34 Sidoarjo
20	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Jl. Jaksa Agung Suprpto No. 9 Sidoarjo
21	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Keluarga Berencana	Jl. Lemah Putro Sidoarjo
22	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Jl. Pahlawan No. 141 Sidoarjo
23	Badan Kepegawaian Daerah	Jl. Jaksa Agung Suprpto No. 1
24	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Jl. Pahlawan No. 56 Sidoarjo
25	Badan Pelayanan Pajak Daerah	Jl. Pahlawan No. 56 Sidoarjo
26	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	Jl. Sultan Agung No. 13 Sidoarjo
27	Kecamatan Porong	Jl. Bhayangkari No. 3 Porong
28	Kecamatan Sidoarjo	Jl. Pahlawan No. 1 Sidoarjo
29	Kecamatan Candi	Jl. Moch. Ridwan No. 1 Candi

Lanjutan Tabel 10. Daftar Instansi Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo

No.	Nama Instansi Perangkat Daerah	Alamat
30	Kecamatan Buduran	Jl. H. R. Moch. Mangundiprojo No. 270 Buduran
31	Kecamatan Gedangan	Jl. Sukodono No. 1 Gedangan
32	Kecamatan Sedati	Jl. Raya Pulungan No. 1 Sedati
33	Kecamatan Waru	Jl. Wedoro Utara No. 8 Waru
34	Kecamatan Taman	Jl. Bebekan Timur No. 7 Taman
35	Kecamatan Krian	Jl. Gubernur Soenandar Priyo Sudarmo No. 1 Krian
36	Kecamatan Wonoayu	Jl. Raya Wonoayu No. 83 Wonoayu
37	Kecamatan Balongbendo	Jl. Mayjen Bambang Yuwono No. 2 Balongbendo
38	Kecamatan Tarik	Jl. Raya Tarik No. 181
39	Kecamatan Tulangan	Jl. Raya Kenongo No. 20 Tulangan
40	Kecamatan Prambon	Jl. Raya Prambon No. 120
41	Kecamatan Krembung	Jl. Kecamatan No. 1 Krembung
42	Kecamatan Sukodono	Jl. Raya Sukodono No. 30
43	Kecamatan Tanggulangin	Jl. Praja Mukti No. 2 Tanggulangin
44	Kecamatan Jabon	Jl. Majapahit No. 1 Jabon

Sumber: Badan Kepegawaian Daerah, 2018.

Instansi perangkat daerah pada tabel 10, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo secara umum memiliki tugas sebagai berikut:

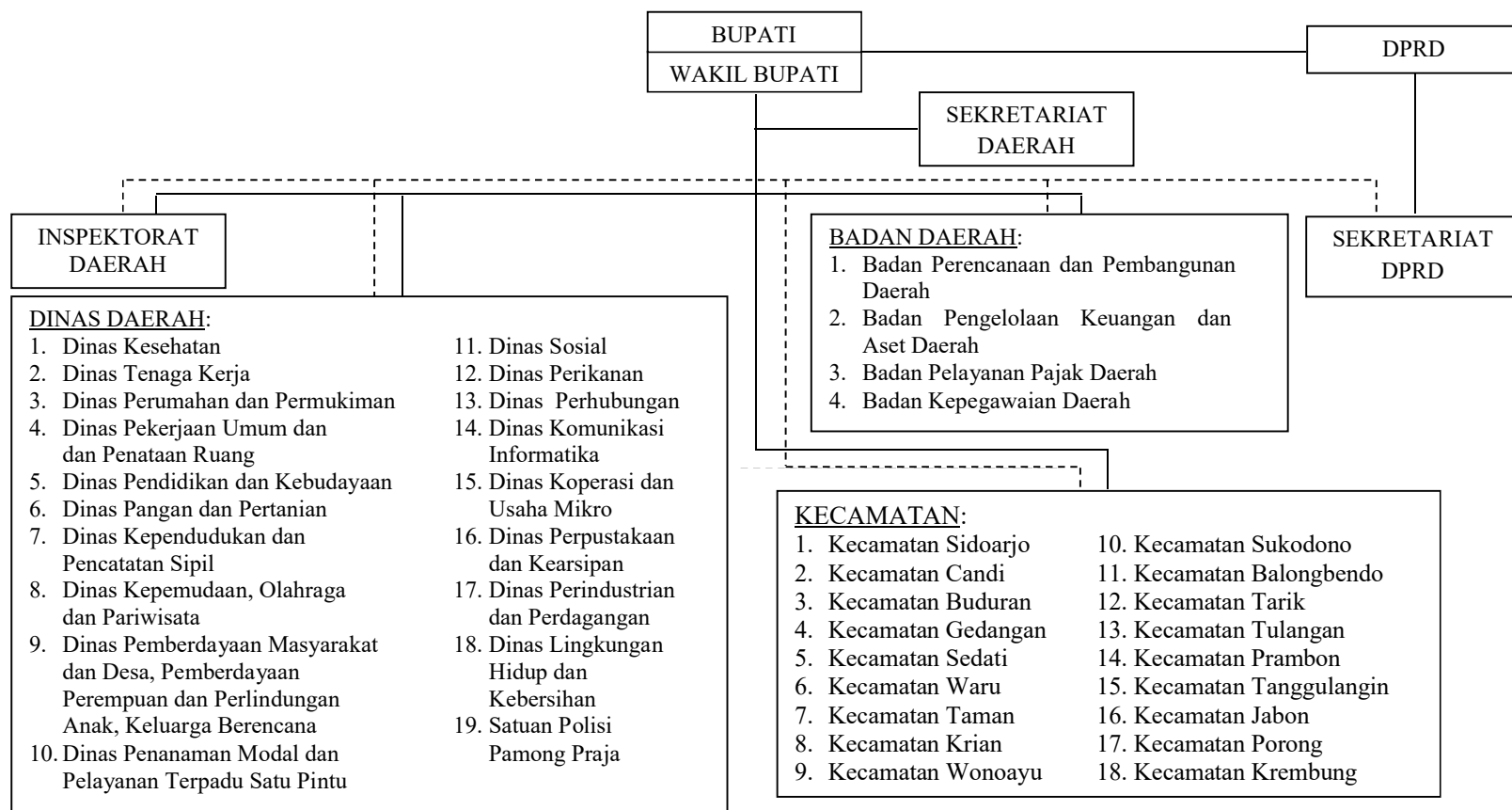
- a. Sekretariat Daerah bertugas membantu Bupati dalam hal penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas dan pelayanan administratif perangkat daerah.
- b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat bertugas memberikan pelayanan administrasi dan dukungan terhadap tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat.

- c. Inspektorat Daerah bertugas mengawasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- d. Dinas Pendidikan bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pendidikan dan kebudayaan.
- e. Dinas Pangan dan Pertanian bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pangan dan pertanian.
- f. Dinas Kesehatan bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan.
- g. Satuan Polisi Pamong Praja bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.
- h. Dinas Perumahan dan Permukiman bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perumahan dan kawasan permukiman serta pertanahan.
- i. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
- j. Dinas Komunikasi dan Informatika bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang komunikasi, informatika, statistik, dan persandian.
- k. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
- l. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perpustakaan dan kearsipan.

- m. Dinas Lingkungan Hidup bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang lingkungan hidup.
- n. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang koperasi, usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah.
- o. Dinas Perikanan bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kelautan dan perikanan.
- p. Dinas Perhubungan bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perhubungan.
- q. Dinas Tenaga Kerja bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang tenaga kerja dan transmigrasi.
- r. Dinas Sosial bertugas menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang sosial.
- s. Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kepemudaan dan olahraga serta bidang pariwisata.
- t. Dinas Perindustrian bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perindustrian dan perdagangan.
- u. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Keluarga Berencana bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

- v. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang penanaman modal.
- w. Badan Kepegawaian bertugas melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan.
- x. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah bertugas melaksanakan fungsi penunjang keuangan.
- y. Badan Pelayanan Pajak bertugas melaksanakan fungsi penunjang keuangan dalam hal pelayanan pajak daerah.
- z. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah bertugas melaksanakan fungsi penunjang perencanaan, penelitian, dan pengembangan.
- aa. Kecamatan-Kecamatan bertugas melaksanakan fungsi koordinasi kewilayahan dan pelayanan tertentu.

Instansi perangkat daerah di atas memiliki hubungan tugas dan pertanggungjawaban baik secara vertikal maupun horisontal. Hubungan tugas dan pertanggungjawaban antar instansi perangkat daerah di Kabupaten Sidoarjo dapat dilihat pada gambar 4.



Gambar 4. Susunan Instansi Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo

(Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016, Olahan Penulis, 2018).

B. Deskripsi Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner yang disebar langsung ke seluruh instansi perangkat daerah di Kabupaten Sidoarjo, hal ini dimaksudkan agar lebih efektif karena dapat meningkatkan *respon rate* responden. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah pegawai yang memenuhi kriteria *purposive sampling* sesuai pada bab 3. Penyebaran kuesioner tahap pertama dilakukan di 22 (dua puluh dua) instansi perangkat daerah di Kabupaten Sidoarjo mulai tanggal 18 Mei 2017 untuk digunakan sebagai responden dalam uji pilot.

Selanjutnya, dilakukan penyebaran kuesioner tahap kedua pada 22 (dua puluh dua) instansi perangkat daerah Kabupaten Sidoarjo yang tidak dilakukan uji pilot. Kuesioner yang dibagikan pada tahap kedua yaitu sebanyak 33 (tiga puluh tiga) eksemplar. Jumlah sampel penelitian yang sudah ditetapkan sebagai bahan penelitian tentang pengaruh anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kabupaten Sidoarjo yaitu sebesar 63 (enam puluh tiga) sampel. Jumlah sampel tersebut terdiri dari 30 (tiga puluh) sampel yang telah dilakukan uji pilot dan 33 (tiga puluh tiga) sampel dilakukan penyebaran kuesioner tahap kedua. Tingkat pengembalian kuesioner dari sampel penelitian dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 11 Tingkat Pengembalian Kuesioner Penelitian

Responden	Jumlah Kuesioner		
	Disebar	Kembali	Layak
Sekretariat Daerah	4	4	4
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat	1	1	1
Inspektorat Daerah	2	2	2
Dinas Pendidikan	2	2	2

Lanjutan Tabel 11. Tingkat Pengembalian Kuesioner Penelitian

Responden	Jumlah Kuesioner		
	Disebar	Kembali	Layak
Dinas Kesehatan	2	2	2
Satuan Polisi Pamong Praja	1	1	1
Dinas Perumahan dan Permukiman	1	1	1
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2	2	2
Dinas Komunikasi dan Informatika	2	2	2
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2	2	2
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1	1	1
Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	2	2	2
Dinas Pangan dan Pertanian	2	2	2
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	1	1	1
Dinas Perikanan	1	1	1
Dinas Perhubungan	2	2	2
Dinas Tenaga Kerja	1	1	1
Dinas Sosial	1	1	1
Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	1	1	1
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1	1	1
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Keluarga Berencana	2	2	2
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2	2	2
Badan Kepegawaian Daerah	2	2	2
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	4	4	4
Badan Pelayanan Pajak Daerah	1	1	1
Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	2	2	2
Kecamatan Porong	1	1	1
Kecamatan Sidoarjo	1	1	1
Kecamatan Candi	1	1	1
Kecamatan Buduran	1	1	1
Kecamatan Gedangan	1	1	1
Kecamatan Sedati	1	1	1
Kecamatan Waru	1	1	1
Kecamatan Taman	1	1	1
Kecamatan Krian	1	1	1
Kecamatan Wonoayu	1	1	1
Kecamatan Balongbendo	1	1	1

Lanjutan Tabel 11. Tingkat Pengembalian Kuesioner Penelitian

Responden	Jumlah Kuesioner		
	Disebar	Kembali	Layak
Kecamatan Tarik	1	1	1
Kecamatan Tulangan	1	1	1
Kecamatan Prambon	1	1	1
Kecamatan Krembung	1	1	1
Kecamatan Sukodono	1	1	1
Kecamatan Tanggulangin	1	1	1
Kecamatan Jabon	1	1	1
Jumlah	63	63	63

Keterangan: : Responden pada uji pilot yang merupakan responden penelitian

: Responden penelitian

Sumber: Data Primer yang Diolah, Penulis, 2018.

Berdasarkan tabel 11, dapat dilihat bahwa tingkat pengembalian kuesioner yang direncanakan sebesar 63 (enam puluh tiga) terpenuhi, karena jumlah kuesioner yang kembali dan layak sesuai dengan jumlah kuesioner yang disebarkan yaitu sebanyak 63 eksemplar. Tingkat kelayakan kuesioner yang disebar pada tahap 1 dan tahap 2 sebesar 100%, sehingga jumlah sampel tidak mengalami perubahan yaitu tetap sebanyak 63 (enam puluh tiga) sampel. Hal ini membuktikan bahwa penyebaran kuesioner yang disampaikan langsung ke pegawai dan diambil kembali sesuai batas waktu yang telah disepakati dapat meningkatkan *respon rate* responden.

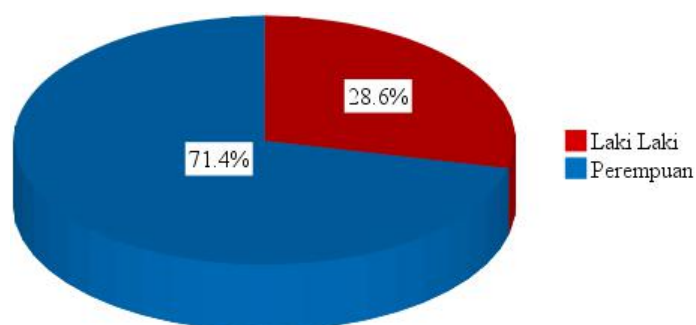
C. Gambaran Umum Responden

Gambaran umum responden disajikan dalam penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan karakteristik responden. Karakteristik responden dijelaskan dengan analisis statistik deskriptif dengan menggunakan *software SPSS v. 23,0*. Penelitian ini menggunakan beberapa karakteristik responden, diantaranya yaitu

sebagai berikut:

1. Jenis Kelamin

Berdasarkan kuesioner yang dikumpulkan oleh peneliti, responden yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 45 orang (71,4%), sedangkan responden dengan jenis kelamin laki-laki hanya sebanyak 18 orang (28,6%). Merujuk pada data tersebut, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden penelitian berjenis kelamin perempuan. Berikut disajikan diagram terkait komposisi responden berdasarkan jenis kelamin responden penelitian:



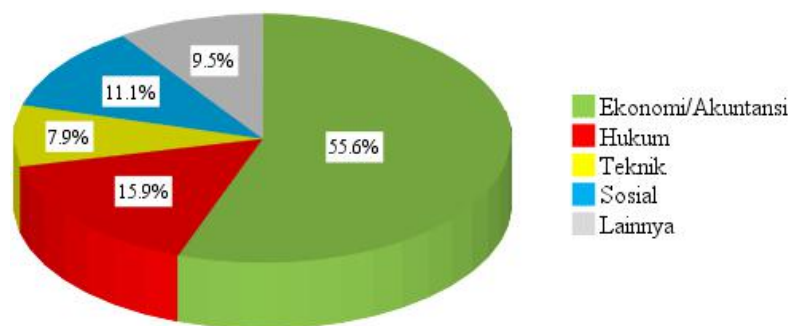
Gambar 5. Komposisi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

(Hasil Komputerisasi, Penulis, 2018).

2. Latar Belakang Pendidikan

Latar belakang pendidikan responden dikelompokkan menjadi empat kategori yaitu ekonomi atau akuntansi, hukum, teknik, sosial, dan lainnya. Berdasarkan kuesioner yang dihimpun, responden yang berlatar pendidikan ekonomi atau akuntansi sebanyak 35 orang (55,6%), responden yang berlatar belakang pendidikan hukum sebanyak 10 orang (15,9%), responden yang berlatar belakang pendidikan teknik sebanyak 5 orang (7,9%), responden yang

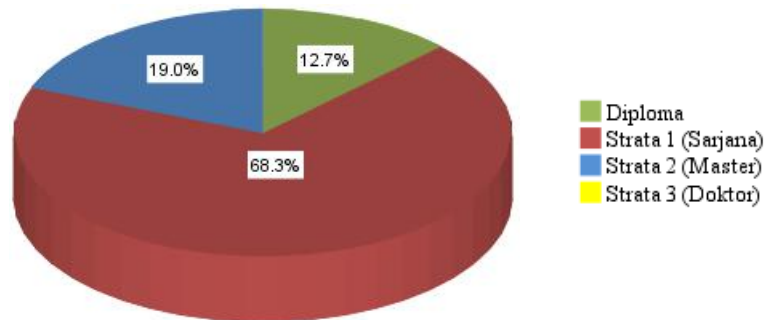
berlatar belakang pendidikan sosial sebanyak 7 orang (11,1%), dan responden yang berlatar belakang pendidikan selain penjabaran di atas sebanyak 6 orang (9,5%). Merujuk pada data yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden berlatar pendidikan ekonomi atau akuntansi. Berikut disajikan diagram terkait komposisi latar belakang pendidikan responden penelitian:



Gambar 6. Komposisi Responden Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan
(Hasil Komputerisasi, Penulis, 2018).

3. Pendidikan Terakhir

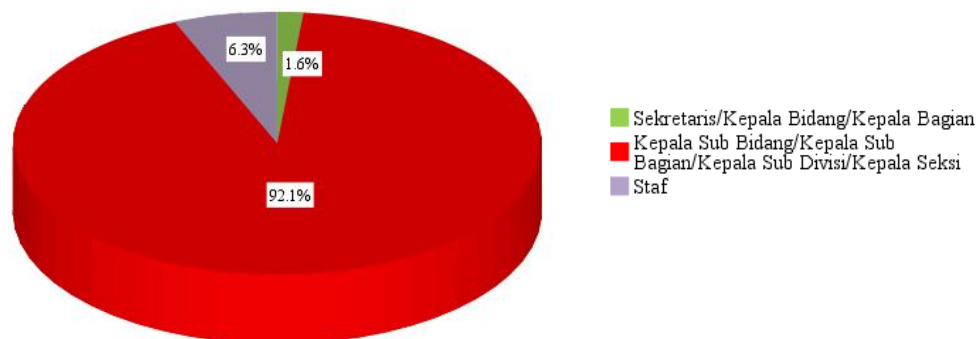
Pendidikan terakhir responden dikelompokkan dalam beberapa tingkatan pendidikan yaitu diploma, strata 1 (sarjana), strata 2 (master), dan strata 3 (dokter). Responden yang berpendidikan terakhir diploma sebanyak 8 orang (12,7%), responden yang berpendidikan terakhir strata 1 sebanyak 43 orang (68,3%), responden yang berpendidikan terakhir strata 2 sebanyak 12 orang (19%), dan tidak ada responden yang berpendidikan terakhir strata 3. Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden berpendidikan terakhir strata 1 atau sarjana. Diagram terkait komposisi responden berdasarkan pendidikan terakhirnya dapat dilihat pada gambar 7.



Gambar 7. Komposisi Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir
(Hasil Komputerisasi, Penulis, 2018).

4. Jabatan

Jabatan responden dalam penelitian ini dikategorikan dalam beberapa kategori yang terdiri atas: a. Sekretaris atau kepala bidang atau kepala bagian, b. Kepala sub bidang atau kepala sub bagian atau kepala sub divisi atau kepala seksi, dan c. Staf. Berdasarkan kuesioner yang dikumpulkan, responden yang menduduki jabatan sebagai sekretaris atau kepala bidang atau kepala bagian hanya 1 orang (1,6%), responden yang menduduki jabatan sebagai kepala sub bidang atau kepala sub bagian atau kepala sub divisi atau kepala seksi sebanyak 58 orang (92,1%), sedangkan responden yang menduduki jabatan sebagai staf sebanyak 4 orang (6,3%). Merujuk pada data tersebut, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden berkedudukan sebagai kepala sub bidang atau kepala sub bagian atau kepala sub divisi atau kepala seksi. Diagram terkait komposisi responden berdasarkan jabatannya dapat dilihat pada gambar 8.



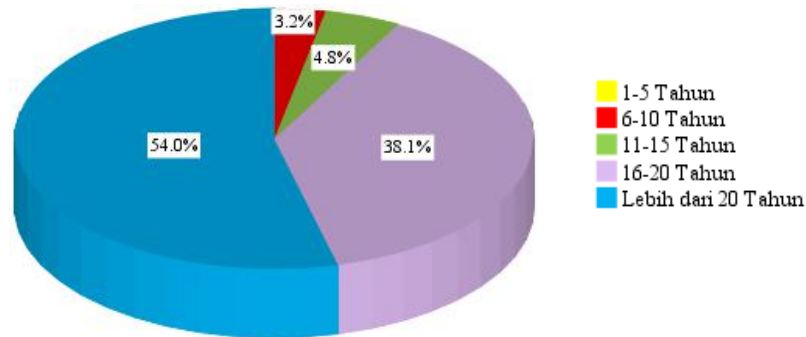
Gambar 8. Komposisi Responden Berdasarkan Jabatan

(Hasil Komputerisasi, Penulis, 2018).

5. Lama Kerja

Lama kerja responden dikelompokkan menjadi beberapa kategori waktu yang terdiri dari: a. 1-5 tahun, b. 6-10 tahun, c. 11-15 tahun, d. 16-20 tahun, dan e. Lebih dari 20 tahun. Berdasarkan kuesioner yang dikumpulkan oleh peneliti, responden yang telah bekerja selama 6-10 tahun sebanyak 2 orang (3,2%), responden yang telah bekerja selama 11-15 tahun sebanyak 3 orang (4,8%), responden yang telah bekerja selama 16-20 tahun sebanyak 24 orang (38,1%), responden yang telah bekerja lebih dari 20 tahun sebanyak 34 orang (54%), dan tidak ada responden yang lama bekerjanya 1-5 tahun. Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden telah bekerja lama yaitu lebih dari 20 tahun, selanjutnya semakin turun kategorinya, semakin sedikit jumlah respondennya. Hal ini ada kaitannya dengan sampel yang dipilih oleh peneliti yaitu responden yang memiliki hubungan dengan anggaran dan akuntabilitas kinerja secara langsung, sehingga responden penelitian merupakan orang-orang pilihan yang telah berkompeten dan memiliki jam kerja yang tinggi. Berikut disajikan diagram terkait komposisi responden

berdasarkan lama kerjanya:

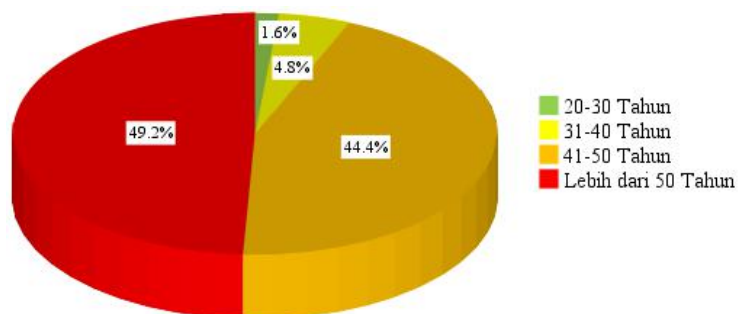


Gambar 9. Komposisi Responden Berdasarkan Lama Kerja

(Hasil Komputerisasi, Penulis, 2018).

6. Usia

Usia responden pada penelitian ini diklasifikasikan sebagai berikut: a. 20-30 tahun, b. 31-40 tahun, c. 41-50 tahun, dan d. lebih dari 50 tahun. Berdasarkan kuesioner yang dikumpulkan, jumlah responden yang berusia 20-30 tahun sebanyak 1 orang (1,6%), responden yang berusia 31-40 tahun sebanyak 3 orang (4,8%), responden yang berusia 41-50 tahun sebanyak 28 orang (44,4%), sedangkan responden yang berusia lebih dari 50 tahun yaitu sebanyak 31 orang (49,2%). Merujuk pada data tersebut, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden berusia lebih dari 50 tahun, dan semakin muda usia semakin sedikit jumlahnya. Hal ini berkaitan dengan jabatan yang diemban responden sebagian besar adalah kepala sub bagian, sehingga usia responden cenderung pada usia dewasa dan lanjut. Diagram terkait komposisi responden berdasarkan usia dapat dilihat pada gambar 10.



Gambar 10. Komposisi Responden Berdasarkan Usia

(Hasil Komputerisasi, Penulis, 2018).

D. Analisis Deskriptif Jawaban Responden

Analisis deskriptif dilakukan untuk mendapatkan gambaran mengenai variabel-variabel penelitian yang digunakan oleh peneliti. Analisis deskriptif disajikan dalam bentuk: 1) tabel yang berisi frekuensi jawaban responden dan mean, dan 2) kategorisasi data untuk menjelaskan mean. Tingkat kategori data didasarkan atas acuan kurva normal dengan perhitungan menggunakan mean ideal (M_i) dan standar deviasi ideal (SD_i) yang telah dijelaskan dalam bab 3. Berikut disajikan tabel terkait kategorisasi data:

Tabel 12 Kategorisasi Data

No	Interval Skor	Kategori
1	$x \geq 4$	Sangat Baik
2	$3 \leq x < 4$	Baik
3	$2 \leq x < 3$	Cukup Baik
4	$x < 2$	Kurang Baik

Sumber: Data Primer yang Diolah, Penulis, 2018.

1. Variabel Perencanaan Anggaran

Distribusi frekuensi jawaban responden atas variabel perencanaan anggaran dapat dilihat pada tabel 13.

Tabel 13 Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden untuk Variabel Perencanaan Anggaran (X₁)

Item	SS		S		N		TS		STS		Jumlah		Mean
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	
X _{1.1}	19	30,2	44	69,8	0	0	0	0	0	0	63	100	4,3
X _{1.2}	18	28,6	45	71,4	0	0	0	0	0	0	63	100	4,29
X _{1.3}	16	25,4	47	74,6	0	0	0	0	0	0	63	100	4,25
X _{1.4}	21	33,3	42	66,7	0	0	0	0	0	0	63	100	4,33
X _{1.5}	20	31,7	43	68,3	0	0	0	0	0	0	63	100	4,32
X _{1.6}	24	38,1	39	61,9	0	0	0	0	0	0	63	100	4,38
X _{1.7}	17	27	46	73	0	0	0	0	0	0	63	100	4,27
X _{1.8}	11	17,5	52	82,5	0	0	0	0	0	0	63	100	4,17
X _{1.9}	14	22,2	49	77,8	0	0	0	0	0	0	63	100	4,22
X _{1.10}	13	20,6	50	79,4	0	0	0	0	0	0	63	100	4,21

Sumber: Data Primer yang Diolah, Penulis, 2018.

Tabel di atas, merupakan interpretasi dari variabel perencanaan anggaran (X₁). Perencanaan anggaran terdiri dari 10 item pernyataan yang dinyatakan dengan lambang “X_{1.(n)}”, berikut adalah hasil interpretasinya: Pertama, item pernyataan X_{1.1} yang berbunyi, “Penyusun perencanaan anggaran telah berpedoman pada rencana pembangunan jangka menengah daerah”. Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa sebagian besar responden memilih pilihan jawaban “setuju”, yaitu sebanyak 44 orang atau 69,8% dari total responden, sebanyak 19 orang atau 30,2% dari total responden memilih pilihan jawaban “sangat setuju”, dan tidak ada responden yang memilih pilihan jawaban “netral”, “tidak setuju”, maupun “sangat tidak setuju”. Mean dari item pernyataan X_{1.1} adalah 4,3. Berdasarkan tabel 12, nilai mean tersebut mengandung arti bahwa menurut responden penyusunan perencanaan anggaran pada instansi pemerintah Kabupaten Sidoarjo sangat baik ditunjukkan dengan penyusunan perencanaan anggaran telah berpedoman pada rencana

pembangunan jangka menengah daerah.

Kedua, item pernyataan $X_{1.2}$ yang berbunyi, “Penyusunan rencana strategis satuan kerja perangkat daerah telah sesuai dengan visi dan misi”. Berdasarkan tabel 13, dapat dilihat bahwa sebagian besar responden memilih pilihan jawaban “setuju”, yaitu sebanyak 45 orang atau 71,4% dari total responden. Kemudian, sebanyak 18 orang atau 28,6% dari total responden memilih pilihan jawaban “sangat setuju”, dan tidak ada responden yang memilih pilihan jawaban “netral”, “tidak setuju”, maupun “sangat tidak setuju”. Mean dari item pernyataan $X_{1.2}$ adalah 4,29. Berdasarkan tabel 12, nilai mean tersebut mengandung arti bahwa menurut responden penyusunan rencana strategis pada instansi pemerintah Kabupaten Sidoarjo sangat baik ditunjukkan dengan penyusunan rencana strategis satuan kerja perangkat daerah telah sesuai dengan visi dan misi.

Ketiga, item pernyataan $X_{1.3}$ berbunyi, “Penyusunan rencana kerja telah berpedoman pada rencana strategis”. Berdasarkan tabel 13, dapat dilihat bahwa sebagian besar responden memilih pilihan jawaban “setuju”, yaitu sebanyak 47 orang atau 74,6% dari total responden. Selanjutnya, sebanyak 16 orang atau 25,4% dari total responden memilih pilihan jawaban “sangat setuju”, dan tidak ada responden yang memilih pilihan jawaban “netral”, “tidak setuju”, maupun “sangat tidak setuju”. Mean dari item pernyataan $X_{1.3}$ adalah 4,25. Berdasarkan tabel 12, nilai mean tersebut mengandung arti bahwa menurut responden penyusunan rencana kerja pada instansi pemerintah Kabupaten Sidoarjo sangat baik ditunjukkan dengan penyusunan rencana kerja telah berpedoman pada

rencana strategis yang telah ditetapkan.

Keempat, item pernyataan $X_{1.4}$ berbunyi, “Penyusunan program telah berpedoman pada rencana strategis”. Berdasarkan tabel 13, dapat dilihat bahwa sebagian besar responden memilih pilihan jawaban “setuju”, yaitu sebanyak 42 orang atau 66,7% dari total responden. Kemudian, sebanyak 21 orang atau 33,3% dari total responden memilih pilihan jawaban “sangat setuju”, dan tidak ada responden yang memilih pilihan jawaban “netral”, “tidak setuju”, maupun “sangat tidak setuju”. Mean dari item pernyataan $X_{1.4}$ adalah 4,33. Berdasarkan tabel 12, nilai mean tersebut mengandung arti bahwa menurut responden penyusunan program pada instansi pemerintah Kabupaten Sidoarjo sangat baik ditunjukkan dengan penyusunan program telah berpedoman pada rencana strategis.

Kelima, item pernyataan $X_{1.5}$ berbunyi, “Penyusunan kegiatan telah berpedoman pada rencana kerja”. Berdasarkan tabel 13, dapat dilihat bahwa sebagian besar responden memilih pilihan jawaban “setuju”, yaitu sebanyak 43 orang atau 68,3% dari total responden. Selanjutnya, sebanyak 20 orang atau 31,7% dari total responden memilih pilihan jawaban “sangat setuju”, dan tidak ada responden yang memilih pilihan jawaban “netral”, “tidak setuju”, maupun “sangat tidak setuju”. Mean dari item pernyataan $X_{1.5}$ adalah 4,32. Berdasarkan tabel 12, nilai mean tersebut mengandung arti bahwa menurut responden penyusunan kegiatan pada instansi pemerintah Kabupaten Sidoarjo sangat baik ditunjukkan dengan penyusunan kegiatan telah berpedoman pada rencana kerja.

Keenam, item pernyataan $X_{1.6}$ berbunyi, “*Output dan outcome* telah ditetapkan dengan jelas dan mendukung program serta kegiatan”. Berdasarkan tabel 13, dapat dilihat bahwa sebagian besar responden memilih pilihan jawaban “setuju”, yaitu sebanyak 39 orang atau 61,9% dari total responden. Kemudian, sebanyak 24 orang atau 38,1% dari total responden memilih pilihan jawaban “sangat setuju”, dan tidak ada responden yang memilih pilihan jawaban “netral”, “tidak setuju”, maupun “sangat tidak setuju”. Mean dari item pernyataan $X_{1.6}$ adalah 4,38. Berdasarkan tabel 12, nilai mean tersebut mengandung arti bahwa menurut responden penyusunan *output* dan *outcome* pada instansi pemerintah Kabupaten Sidoarjo sangat baik ditunjukkan dengan *output* dan *outcome* ditetapkan dengan jelas dan mendukung program serta kegiatan.

Ketujuh, item pernyataan $X_{1.7}$ berbunyi, “Penyusunan indikator kinerja utama program telah mengacu pada *outcome*”. Berdasarkan tabel 13, dapat dilihat bahwa sebagian besar responden memilih pilihan jawaban “setuju”, yaitu sebanyak 46 orang atau 73% dari total responden. Selanjutnya, sebanyak 17 orang atau 27% dari total responden memilih pilihan jawaban “sangat setuju”, dan tidak ada responden yang memilih pilihan jawaban “netral”, “tidak setuju”, maupun “sangat tidak setuju”. Mean dari item pernyataan $X_{1.7}$ adalah 4,27. Berdasarkan tabel 12, nilai mean tersebut mengandung arti bahwa menurut responden penyusunan indikator kinerja utama pada instansi pemerintah Kabupaten Sidoarjo sangat baik ditunjukkan dengan indikator kinerja utama program telah mengacu pada *outcome*.

Kedelapan, item pernyataan $X_{1.8}$ berbunyi, “Penyusunan indikator kinerja kegiatan telah mengacu pada *output*”. Berdasarkan tabel 13, dapat dilihat bahwa sebagian besar responden memilih pilihan jawaban “setuju”, yaitu sebanyak 52 orang atau 82,5% dari total responden. Kemudian, sebanyak 11 orang atau 17,5% dari total responden memilih pilihan jawaban “sangat setuju”, dan tidak ada responden yang memilih pilihan jawaban “netral”, “tidak setuju”, maupun “sangat tidak setuju”. Mean dari item pernyataan $X_{1.8}$ adalah 4,17. Berdasarkan tabel 12, nilai mean tersebut mengandung arti bahwa menurut responden penyusunan indikator kinerja kegiatan pada instansi pemerintah Kabupaten Sidoarjo sangat baik ditunjukkan dengan indikator kinerja kegiatan telah mengacu pada *output*.

Kesembilan, item pernyataan $X_{1.9}$ berbunyi, “Penyusunan alokasi anggaran telah berpedoman pada indikator kinerja yang harus dicapai”. Berdasarkan tabel 13, dapat dilihat bahwa sebagian besar responden memilih pilihan jawaban “setuju”, yaitu sebanyak 49 orang atau 77,8% dari total responden. Selanjutnya, sebanyak 14 orang atau 22,2% dari total responden memilih pilihan jawaban “sangat setuju”, dan tidak ada responden yang memilih pilihan jawaban “netral”, “tidak setuju”, maupun “sangat tidak setuju”. Mean dari item pernyataan $X_{1.9}$ adalah 4,22. Berdasarkan tabel 12, nilai mean tersebut mengandung arti bahwa menurut responden penyusunan alokasi anggaran pada instansi pemerintah Kabupaten Sidoarjo sangat baik ditunjukkan dengan alokasi anggaran telah berpedoman pada indikator kinerja yang harus dicapai.

Terakhir, item pernyataan $X_{1.10}$ berbunyi, “Penyusunan alokasi anggaran telah berpedoman pada standar biaya”. Berdasarkan tabel 13, dapat dilihat bahwa sebagian besar responden memilih pilihan jawaban “setuju”, yaitu sebanyak 50 orang atau 79,4% dari total responden. Selanjutnya, sebanyak 13 orang atau 20,6% dari total responden memilih pilihan jawaban “sangat setuju”, dan tidak ada responden yang memilih pilihan jawaban “netral”, “tidak setuju”, maupun “sangat tidak setuju”. Mean dari item pernyataan $X_{1.10}$ adalah 4,21. Berdasarkan tabel 12, nilai mean tersebut mengandung arti bahwa menurut responden penyusunan alokasi anggaran pada instansi pemerintah Kabupaten Sidoarjo sangat baik ditunjukkan dengan alokasi anggaran telah berpedoman pada standar biaya.

2. Variabel Pelaksanaan Anggaran

Distribusi frekuensi jawaban responden atas variabel pelaksanaan anggaran dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 14 Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden untuk Variabel Pelaksanaan Anggaran (X_2)

Item	SS		S		N		TS		STS		Jumlah		Mean
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	
$X_{2.1}$	15	23,8	48	76,2	0	0	0	0	0	0	63	100	4,24
$X_{2.2}$	9	14,3	54	85,7	0	0	0	0	0	0	63	100	4,14
$X_{2.3}$	10	15,9	53	84,1	0	0	0	0	0	0	63	100	4,16
$X_{2.4}$	14	22,2	47	74,6	2	3,2	0	0	0	0	63	100	4,2
$X_{2.5}$	6	9,5	57	90,5	0	0	0	0	0	0	63	100	4,1
$X_{2.6}$	9	14,3	33	52,4	16	25,4	5	7,9	0	0	63	100	3,73

Sumber: Data Primer yang Diolah, Penulis, 2018.

Tabel di atas, merupakan interpretasi dari variabel pelaksanaan anggaran (X_2). Pelaksanaan anggaran terdiri dari 6 item pernyataan yang dinyatakan

dengan lambang “ $X_{2.(n)}$ ”, berikut adalah hasil interpretasinya: Pertama, item pernyataan $X_{2.1}$ yang berbunyi, “Anggaran telah dilaksanakan sesuai dengan dokumen pelaksanaan anggaran”. Berdasarkan tabel 14, dapat dilihat bahwa sebagian besar responden memilih pilihan jawaban “setuju”, yaitu sebanyak 48 orang atau 76,2% dari total responden, sebanyak 15 orang atau 23,8% dari total responden memilih pilihan jawaban “sangat setuju”, dan tidak ada responden yang memilih pilihan jawaban “netral”, “tidak setuju”, maupun “sangat tidak setuju”. Mean dari item pernyataan $X_{2.1}$ adalah 4,24. Berdasarkan tabel 12, nilai mean tersebut mengandung arti bahwa menurut responden pelaksanaan anggaran pada instansi pemerintah Kabupaten Sidoarjo sangat baik ditunjukkan dengan anggaran dilaksanakan sesuai dengan dokumen pelaksanaan anggaran.

Kedua, item pernyataan $X_{2.2}$ yang berbunyi, “Penggunaan dana pada anggaran telah dilaksanakan dengan menerapkan prinsip efisien dan efektivitas”. Berdasarkan tabel 14, dapat dilihat bahwa sebagian besar responden memilih pilihan jawaban “setuju”, yaitu sebanyak 54 orang atau 85,7% dari total responden. Kemudian, sebanyak 9 orang atau 14,3% dari total responden memilih pilihan jawaban “sangat setuju”, dan tidak ada responden yang memilih pilihan jawaban “netral”, “tidak setuju”, maupun “sangat tidak setuju”. Mean dari item pernyataan $X_{2.2}$ adalah 4,14. Berdasarkan tabel 12, nilai mean tersebut mengandung arti bahwa menurut responden pelaksanaan anggaran pada instansi pemerintah Kabupaten Sidoarjo sangat baik ditunjukkan dengan penggunaan dana anggaran telah dilaksanakan dengan menerapkan prinsip efisien dan efektivitas.

Ketiga, item pernyataan $X_{2.3}$ yang berbunyi, “Penerimaan berupa uang disetorkan ke rekening kas umum dalam satu hari kerja”. Berdasarkan tabel 14, dapat dilihat bahwa sebagian besar responden memilih pilihan jawaban “setuju”, yaitu sebanyak 53 orang atau 84,1% dari total responden. Selanjutnya, sebanyak 10 orang atau 15,9% dari total responden memilih pilihan jawaban “sangat setuju”, dan tidak ada responden yang memilih pilihan jawaban “netral”, “tidak setuju”, maupun “sangat tidak setuju”. Mean dari item pernyataan $X_{2.3}$ adalah 4,16. Berdasarkan tabel 12, nilai mean tersebut mengandung arti bahwa menurut responden pelaksanaan anggaran pendapatan pada instansi pemerintah Kabupaten Sidoarjo sangat baik ditunjukkan dengan penerimaan berupa uang disetorkan ke rekening kas umum dalam satu hari kerja.

Keempat, item pernyataan $X_{2.4}$ yang berbunyi, “Pembayaran belanja anggaran dilakukan setelah barang atau jasa diterima dan sesuai dengan surat penyediaan dana”. Berdasarkan tabel 14, dapat dilihat bahwa sebagian besar responden memilih pilihan jawaban “setuju”, yaitu sebanyak 47 orang atau 74,6% dari total responden. Kemudian, sebanyak 14 orang atau 22,2% dari total responden memilih pilihan jawaban “sangat setuju”. Selanjutnya, sebanyak 2 orang atau 3,2% dari total responden memilih pilihan jawaban “netral”, dan tidak ada responden yang memilih pilihan jawaban “tidak setuju”, maupun “sangat tidak setuju”. Mean dari item pernyataan $X_{2.4}$ adalah 4,2. Berdasarkan tabel 12, nilai mean tersebut mengandung arti bahwa menurut responden pelaksanaan anggaran belanja pada instansi pemerintah Kabupaten

Sidoarjo sangat baik ditunjukkan dengan pembayaran belanja anggaran dilakukan setelah barang atau jasa diterima dan sesuai dengan surat penyediaan dana.

Kelima, item pernyataan $X_{2.5}$ yang berbunyi, “Pemindahbukuan rekening dana cadangan berdasarkan rencana pelaksanaan kegiatan”. Berdasarkan tabel 14, dapat dilihat bahwa sebagian besar responden memilih pilihan jawaban “setuju”, yaitu sebanyak 57 orang atau 90,5% dari total responden. Selanjutnya, sebanyak 6 orang atau 9,5% dari total responden memilih pilihan jawaban “sangat setuju”, dan tidak ada responden yang memilih pilihan jawaban “netral”, “tidak setuju”, maupun “sangat tidak setuju”. Mean dari item pernyataan $X_{2.5}$ adalah 4,1. Berdasarkan tabel 12, nilai mean tersebut mengandung arti bahwa menurut responden pelaksanaan anggaran pembiayaan pada instansi pemerintah Kabupaten Sidoarjo sangat baik ditunjukkan dengan pemindahbukuan rekening dana cadangan dilakukan berdasarkan rencana pelaksanaan kegiatan.

Terakhir, item pernyataan $X_{2.6}$ yang berbunyi, “Ada insentif yang diterima apabila pelaksanaan anggaran berjalan dengan baik”. Berdasarkan tabel 14, dapat dilihat bahwa sebagian besar responden memilih pilihan jawaban “setuju”, yaitu sebanyak 33 orang atau 52,4% dari total responden. Kemudian, sebanyak 16 orang atau 25,4% dari total responden memilih pilihan jawaban “netral”, sebanyak 9 orang atau 14,3% dari total responden memilih pilihan jawaban “sangat setuju”, sebanyak 5 orang atau 7,9% dari total responden memilih pilihan jawaban “tidak setuju”, dan tidak ada responden yang memilih

pilihan jawaban “sangat tidak setuju”. Mean dari item pernyataan X_{2.6} adalah 3,73. Berdasarkan tabel 12, nilai mean tersebut mengandung arti bahwa menurut responden pelaksanaan anggaran pada instansi pemerintah Kabupaten Sidoarjo baik ditunjukkan dengan adanya insentif yang diterima apabila pelaksanaan anggaran berjalan dengan baik.

3. Variabel Pertanggungjawaban Anggaran

Distribusi frekuensi jawaban responden atas variabel pertanggungjawaban anggaran dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 15 Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden untuk Variabel Pertanggungjawaban Anggaran (X₃)

Item	SS		S		N		TS		STS		Jumlah		Mean
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	
X _{3.1}	12	19	51	81	0	0	0	0	0	0	63	100	4,19
X _{3.2}	9	14,3	54	85,7	0	0	0	0	0	0	63	100	4,14
X _{3.3}	7	11,1	56	88,9	0	0	0	0	0	0	63	100	4,11

Sumber: Data Primer yang Diolah, Penulis, 2018.

Tabel di atas, merupakan interpretasi dari variabel pertanggungjawaban anggaran (X₃). Terdapat 3 item pernyataan tentang variabel pertanggungjawaban anggaran yang diajukan kepada responden. Item-item pernyataan tentang pertanggungjawaban anggaran dinyatakan dengan lambang “X_{3.(n)}”, berikut adalah hasil interpretasinya: Pertama, item pernyataan X_{3.1} yang berbunyi, “Satuan kerja perangkat daerah menyelenggarakan akuntansi atas setiap transaksi keuangan, aset, utang, dan ekuitas”. Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa sebagian besar responden memilih pilihan jawaban “setuju”, yaitu sebanyak 51 orang atau 81% dari total responden, sebanyak 12 orang atau 19% dari total responden memilih pilihan jawaban “sangat setuju”,

dan tidak ada responden yang memilih pilihan jawaban “netral”, “tidak setuju”, maupun “sangat tidak setuju”. Mean dari item pernyataan $X_{3.1}$ adalah 4,19. Berdasarkan tabel 12, nilai mean tersebut mengandung arti bahwa menurut responden pertanggungjawaban anggaran pada instansi pemerintah Kabupaten Sidoarjo sangat baik ditunjukkan dengan satuan kerja perangkat daerah menyelenggarakan akuntansi atas setiap transaksi keuangan, aset, utang, dan ekuitas.

Kedua, item pernyataan $X_{3.2}$ yang berbunyi, “Laporan keuangan telah dibuat sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah”. Berdasarkan tabel 15, dapat dilihat bahwa sebagian besar responden memilih pilihan jawaban “setuju”, yaitu sebanyak 54 orang atau 85,7% dari total responden. Kemudian, sebanyak 9 orang atau 14,3% dari total responden memilih pilihan jawaban “sangat setuju”, dan tidak ada responden yang memilih pilihan jawaban “netral”, “tidak setuju”, maupun “sangat tidak setuju”. Mean dari item pernyataan $X_{3.2}$ adalah 4,14. Berdasarkan tabel 12, nilai mean tersebut mengandung arti bahwa menurut responden pertanggungjawaban anggaran pada instansi pemerintah Kabupaten Sidoarjo sangat baik ditunjukkan dengan laporan keuangan telah dibuat sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Terakhir, item pernyataan $X_{3.3}$ yang berbunyi, “Pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan anggaran telah sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dengan menerbitkan laporan keuangan dan diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan sebagai bentuk dari pertanggungjawaban publik”. Berdasarkan tabel 15, dapat dilihat bahwa sebagian besar responden memilih

pilihan jawaban “setuju”, yaitu sebanyak 56 orang atau 88,9% dari total responden. Selanjutnya, sebanyak 7 orang atau 11,1% dari total responden memilih pilihan jawaban “sangat setuju”, dan tidak ada responden yang memilih pilihan jawaban “netral”, “tidak setuju”, maupun “sangat tidak setuju”. Mean dari item pernyataan X_{3.3} adalah 4,11. Berdasarkan tabel 12, nilai mean tersebut mengandung arti bahwa menurut responden pertanggungjawaban anggaran pada instansi pemerintah Kabupaten Sidoarjo sangat baik ditunjukkan dengan pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan anggaran telah sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dengan menerbitkan laporan keuangan dan diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan sebagai bentuk dari pertanggungjawaban publik.

4. Variabel Evaluasi Kinerja

Distribusi frekuensi jawaban responden atas variabel evaluasi kinerja dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 16 Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden untuk Variabel Evaluasi Kinerja (X₄)

Item	SS		S		N		TS		STS		Jumlah		Mean
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	
X _{4.1}	20	31,7	43	68,3	0	0	0	0	0	0	63	100	4,32
X _{4.2}	17	27	46	73	0	0	0	0	0	0	63	100	4,27
X _{4.3}	21	33,3	42	66,7	0	0	0	0	0	0	63	100	4,33
X _{4.4}	18	28,6	45	71,4	0	0	0	0	0	0	63	100	4,29

Sumber: Data Primer yang Diolah, Penulis, 2018.

Tabel di atas, merupakan interpretasi dari variabel evaluasi kinerja (X₄). Terdapat empat item pernyataan tentang variabel evaluasi kinerja yang diajukan kepada responden. Item pernyataan tentang evaluasi kinerja

dinyatakan dengan lambang “ $X_{4.(n)}$ ”, berikut adalah hasil interpretasinya: Pertama, item pernyataan $X_{4.1}$ yang berbunyi, “Terdapat evaluasi atas pelaksanaan program dan kegiatan”. Berdasarkan tabel 16, dapat dilihat bahwa sebagian besar responden memilih pilihan jawaban “setuju”, yaitu sebanyak 43 orang atau 68,3% dari total responden, sebanyak 20 orang atau 31,7% dari total responden memilih pilihan jawaban “sangat setuju”, dan tidak ada responden yang memilih pilihan jawaban “netral”, “tidak setuju”, maupun “sangat tidak setuju”. Mean dari item pernyataan $X_{4.1}$ adalah 4,32. Berdasarkan tabel 12, nilai mean tersebut mengandung arti bahwa menurut responden evaluasi kinerja pada instansi pemerintah Kabupaten Sidoarjo berjalan sangat baik ditunjukkan dengan adanya evaluasi atas pelaksanaan program dan kegiatan.

Kedua, item pernyataan $X_{4.2}$ yang berbunyi, “Evaluasi dilakukan dengan membandingkan realisasi *input* dan *output* kegiatan, serta *outcome* program dengan rencana kegiatan dan program”. Berdasarkan tabel 16, dapat dilihat bahwa sebagian besar responden memilih pilihan jawaban “setuju”, yaitu sebanyak 46 orang atau 73% dari total responden. Kemudian, sebanyak 17 orang atau 27% dari total responden memilih pilihan jawaban “sangat setuju”, dan tidak ada responden yang memilih pilihan jawaban “netral”, “tidak setuju”, maupun “sangat tidak setuju”. Mean dari item pernyataan $X_{4.2}$ adalah 4,27. Berdasarkan tabel 12, nilai mean tersebut mengandung arti bahwa menurut responden pelaksanaan evaluasi kinerja pada instansi pemerintah Kabupaten Sidoarjo sangat baik yang ditunjukkan dengan evaluasi dilakukan dengan membandingkan realisasi *input* dan *output* kegiatan, serta *outcome* program

dengan rencana kegiatan dan program.

Ketiga, item pernyataan X_{4.3} yang berbunyi, “Hasil evaluasi dijadikan sebagai dasar penyusunan rencana program dan kegiatan tahun berikutnya”. Berdasarkan tabel 16, dapat dilihat bahwa sebagian besar responden memilih pilihan jawaban “setuju”, yaitu sebanyak 42 orang atau 66,7% dari total responden. Kemudian, sebanyak 21 orang atau 33,3% dari total responden memilih pilihan jawaban “sangat setuju”, dan tidak ada responden yang memilih pilihan jawaban “netral”, “tidak setuju”, maupun “sangat tidak setuju”. Mean dari item pernyataan X_{4.3} adalah 4,33. Berdasarkan tabel 12, nilai mean tersebut mengandung arti bahwa menurut responden pelaksanaan evaluasi kinerja pada instansi pemerintah Kabupaten Sidoarjo sangat baik ditunjukkan dengan hasil evaluasi dijadikan sebagai dasar penyusunan rencana program dan kegiatan tahun berikutnya.

Terakhir, item pernyataan X_{4.4} yang berbunyi, “Hasil evaluasi dapat mengungkapkan kendala yang terjadi dalam menjalankan program dan kegiatan”. Berdasarkan tabel 16, dapat dilihat bahwa sebagian besar responden memilih pilihan jawaban “setuju”, yaitu sebanyak 45 orang atau 71,4% dari total responden. Selanjutnya, sebanyak 18 orang atau 28,6% dari total responden memilih pilihan jawaban “sangat setuju”, dan tidak ada responden yang memilih pilihan jawaban “netral”, “tidak setuju”, maupun “sangat tidak setuju”. Mean dari item pernyataan X_{4.4} adalah 4,29. Berdasarkan tabel 12, nilai mean tersebut mengandung arti bahwa menurut responden evaluasi kinerja pada instansi pemerintah Kabupaten Sidoarjo sangat baik ditunjukkan

dengan hasil evaluasi dapat mengungkapkan kendala yang terjadi dalam menjalankan program dan kegiatan.

5. Variabel Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Distribusi frekuensi jawaban responden atas variabel akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 17 Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden untuk Variabel Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y)

Item	SS		S		N		TS		STS		Jumlah		Mean
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	
Y _{1.1}	13	20,6	50	79,4	0	0	0	0	0	0	63	100	4,21
Y _{1.2}	5	7,9	58	92,1	0	0	0	0	0	0	63	100	4,08
Y _{1.3}	11	17,5	52	82,5	0	0	0	0	0	0	63	100	4,17
Y _{1.4}	20	31,7	43	68,3	0	0	0	0	0	0	63	100	4,32
Y _{1.5}	13	20,6	50	79,4	0	0	0	0	0	0	63	100	4,21
Y _{1.6}	18	28,6	45	71,4	0	0	0	0	0	0	63	100	4,29
Y _{1.7}	14	22,2	49	77,8	0	0	0	0	0	0	63	100	4,22
Y _{1.8}	18	28,6	45	71,4	0	0	0	0	0	0	63	100	4,29
Y _{1.9}	24	38,1	39	61,9	0	0	0	0	0	0	63	100	4,38

Sumber: Data Primer yang Diolah, Penulis, 2018.

Tabel di atas, merupakan interpretasi dari variabel akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Y). Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah terdiri dari 9 item pernyataan yang dinyatakan dengan lambang “Y_{1.(n)}”, berikut adalah hasil interpretasinya: Pertama, item pernyataan Y_{1.1} yang berbunyi, “Terdapat komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi untuk mengelola organisasi sesuai dengan visi, misi dan tujuan satuan kerja perangkat daerah”. Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa sebagian besar responden memilih pilihan jawaban “setuju”, yaitu sebanyak 50 orang atau 79,4% dari total responden, sebanyak 13 orang atau 20,6% dari total responden memilih

pilihan jawaban “sangat setuju”, dan tidak ada responden yang memilih pilihan jawaban “netral”, “tidak setuju”, maupun “sangat tidak setuju”. Mean dari item pernyataan Y_{1.1} adalah 4,21. Berdasarkan tabel 12, nilai mean tersebut mengandung arti bahwa menurut responden akuntabilitas kinerja pada instansi pemerintah Kabupaten Sidoarjo sangat baik ditunjukkan dengan terlaksananya prinsip akuntabilitas kinerja yaitu terdapat komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi untuk mengelola organisasi sesuai dengan visi, misi dan tujuan satuan kerja perangkat daerah.

Kedua, item pernyataan Y_{1.2} yang berbunyi, “Terdapat Terdapat komitmen menyusun laporan kinerja dengan baik”. Berdasarkan tabel 17, dapat dilihat bahwa sebagian besar responden memilih pilihan jawaban “setuju”, yaitu sebanyak 58 orang atau 92,1% dari total responden. Kemudian, sebanyak 5 orang atau 7,9% dari total responden memilih pilihan jawaban “sangat setuju”, dan tidak ada responden yang memilih pilihan jawaban “netral”, “tidak setuju”, maupun “sangat tidak setuju”. Mean dari item pernyataan Y_{1.2} adalah 4,08. Berdasarkan tabel 12, nilai mean tersebut mengandung arti bahwa menurut responden akuntabilitas kinerja pada instansi pemerintah Kabupaten Sidoarjo sangat baik ditunjukkan dengan terlaksananya prinsip akuntabilitas kinerja yaitu terdapat komitmen menyusun laporan kinerja dengan baik.

Ketiga, item pernyataan Y_{1.3} berbunyi, “Terdapat sistem yang menjamin penggunaan sumber daya secara konsisten”. Berdasarkan tabel 17, dapat dilihat bahwa sebagian besar responden memilih pilihan jawaban “setuju”, yaitu sebanyak 52 orang atau 82,5% dari total responden. Selanjutnya, sebanyak 11

orang atau 17,5% dari total responden memilih pilihan jawaban “sangat setuju”, dan tidak ada responden yang memilih pilihan jawaban “netral”, “tidak setuju”, maupun “sangat tidak setuju”. Mean dari item pernyataan Y_{1.3} adalah 4,17. Berdasarkan tabel 12, nilai mean tersebut mengandung arti bahwa menurut responden akuntabilitas kinerja instansi pada pemerintah Kabupaten Sidoarjo sangat baik ditunjukkan dengan adanya sistem yang menjamin penggunaan sumber daya secara konsisten.

Keempat, item pernyataan Y_{1.4} berbunyi, “Terdapat komitmen untuk mempublikasikan hasil laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada publik”. Berdasarkan tabel 17, dapat dilihat bahwa sebagian besar responden memilih pilihan jawaban “setuju”, yaitu sebanyak 43 orang atau 68,3% dari total responden. Kemudian, sebanyak 20 orang atau 31,7% dari total responden memilih pilihan jawaban “sangat setuju”, dan tidak ada responden yang memilih pilihan jawaban “netral”, “tidak setuju”, maupun “sangat tidak setuju”. Mean dari item pernyataan Y_{1.4} adalah 4,32. Berdasarkan tabel 12, nilai mean tersebut mengandung arti bahwa menurut responden akuntabilitas kinerja pada instansi pemerintah Kabupaten Sidoarjo sangat baik ditunjukkan dengan terdapat komitmen untuk mempublikasikan hasil laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada publik.

Kelima, item pernyataan Y_{1.5} berbunyi, “Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah disusun dengan menjabarkan pencapaian visi, misi, hasil, dan manfaat”. Berdasarkan tabel 17, dapat dilihat bahwa sebagian besar responden memilih pilihan jawaban “setuju”, yaitu sebanyak 50 orang atau

79,4% dari total responden. Selanjutnya, sebanyak 13 orang atau 20,6% dari total responden memilih pilihan jawaban “sangat setuju”, dan tidak ada responden yang memilih pilihan jawaban “netral”, “tidak setuju”, maupun “sangat tidak setuju”. Mean dari item pernyataan Y_{1.5} adalah 4,21. Berdasarkan tabel 12, nilai mean tersebut mengandung arti bahwa menurut responden akuntabilitas kinerja pada instansi pemerintah Kabupaten Sidoarjo sangat baik ditunjukkan dengan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah disusun dengan menjabarkan pencapaian visi, misi, hasil, dan manfaat.

Keenam, item pernyataan Y_{1.6} berbunyi, “Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah menyajikan tingkat pencapaian sasaran dan target kinerja”. Berdasarkan tabel 17, dapat dilihat bahwa sebagian besar responden memilih pilihan jawaban “setuju”, yaitu sebanyak 45 orang atau 71,4% dari total responden. Kemudian, sebanyak 18 orang atau 28,6% dari total responden memilih pilihan jawaban “sangat setuju”, dan tidak ada responden yang memilih pilihan jawaban “netral”, “tidak setuju”, maupun “sangat tidak setuju”. Mean dari item pernyataan Y_{1.6} adalah 4,29. Berdasarkan tabel 12, nilai mean tersebut mengandung arti bahwa menurut responden akuntabilitas kinerja pada instansi pemerintah Kabupaten Sidoarjo sangat baik ditunjukkan dengan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah menyajikan tingkat pencapaian sasaran dan target kinerja.

Ketujuh, item pernyataan Y_{1.7} berbunyi, “Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah menyajikan tingkat keberhasilan program dan kegiatan secara keseluruhan”. Berdasarkan tabel 17, dapat dilihat bahwa sebagian besar

responden memilih pilihan jawaban “setuju”, yaitu sebanyak 49 orang atau 77,8% dari total responden. Selanjutnya, sebanyak 14 orang atau 22,2% dari total responden memilih pilihan jawaban “sangat setuju”, dan tidak ada responden yang memilih pilihan jawaban “netral”, “tidak setuju”, maupun “sangat tidak setuju”. Mean dari item pernyataan Y_{1.7} adalah 4,22. Berdasarkan tabel 12, nilai mean tersebut mengandung arti bahwa menurut responden pelaksanaan akuntabilitas kinerja pada instansi pemerintah Kabupaten Sidoarjo sangat baik ditunjukkan dengan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah menyajikan tingkat keberhasilan program dan kegiatan secara keseluruhan.

Kedelapan, item pernyataan Y_{1.8} berbunyi, “Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang disajikan menjelaskan informasi yang jujur, objektif, transparan, dan akurat”. Berdasarkan tabel 17, dapat dilihat bahwa sebagian besar responden memilih pilihan jawaban “setuju”, yaitu sebanyak 45 orang atau 71,4% dari total responden. Kemudian, sebanyak 18 orang atau 28,6% dari total responden memilih pilihan jawaban “sangat setuju”, dan tidak ada responden yang memilih pilihan jawaban “netral”, “tidak setuju”, maupun “sangat tidak setuju”. Mean dari item pernyataan Y_{1.8} adalah 4,29. Berdasarkan tabel 12, nilai mean tersebut mengandung arti bahwa menurut responden akuntabilitas kinerja pada instansi pemerintah Kabupaten Sidoarjo sangat baik ditunjukkan dengan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang disajikan menjelaskan informasi yang jujur, objektif, transparan, dan akurat dimana hal ini sesuai dengan prinsip akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Terakhir, item pernyataan Y_{1.9} berbunyi, “Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam merencanakan program dan kegiatan pada tahun berikutnya”. Berdasarkan tabel 17, dapat dilihat bahwa sebagian besar responden memilih pilihan jawaban “setuju”, yaitu sebanyak 39 orang atau 61,9% dari total responden. Selanjutnya, sebanyak 24 orang atau 38,1% dari total responden memilih pilihan jawaban “sangat setuju”, dan tidak ada responden yang memilih pilihan jawaban “netral”, “tidak setuju”, maupun “sangat tidak setuju”. Mean dari item pernyataan Y_{1.9} adalah 4,38. Berdasarkan tabel 12, nilai mean tersebut mengandung arti bahwa menurut responden akuntabilitas kinerja pada instansi pemerintah Kabupaten Sidoarjo sangat baik ditunjukkan dengan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam merencanakan program dan kegiatan pada tahun berikutnya.

E. Uji Validitas dan Reliabilitas

Uji validitas pada penelitian ini digunakan untuk mengetahui apakah pernyataan pada kuesioner yang telah disebarakan dapat mengukur variabel yang akan diukur. Uji validitas dilakukan dengan menggunakan analisis *correlate bivariate* pada *software SPSS v. 23,0*. Kriteria item dinyatakan valid adalah sebagai berikut: 1. nilai $r_{\text{hitung}} (\text{pearson correlation}) > r_{\text{tabel}}$, atau 2. nilai signifikansi $< 0,05$. Penelitian ini menggunakan tingkat signifikansi 5% dan $N = 63$, maka r_{tabel} pada penelitian adalah 0,248. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka kriterian uji validitas pada penelitian ini adalah jika nilai *pearson*

$correlation > 0,248$ atau nilai $sig < 0,5$, maka item pernyataan dinyatakan valid. Kemudian, hanya item pernyataan yang valid saja yang akan dilakukan uji reliabilitas.

Uji reliabilitas dilakukan untuk mengukur handal atau tidaknya kuesioner yang digunakan dalam mengukur variabel penelitian. Metode yang digunakan untuk mengukur reliabilitas yaitu metode *Alpha Cronbach*. Uji reliabilitas pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan *Reliability Analysis* pada *software SPSS v. 23,0*. Suatu instrumen penelitian dikatakan reliabel apabila nilai $alpha > 0,6$.

1. Variabel Perencanaan Anggaran

Hasil uji validitas terhadap item pernyataan tentang perencanaan anggaran dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 18 Hasil Uji Validitas Variabel Perencanaan Anggaran

Item	r-hitung (<i>Pearson Correlation</i>)	r-tabel (61, 0,5%)	Sig. (2-tailed)	Keterangan
X _{1.1}	0,429**	0,248	0,000	Valid
X _{1.2}	0,762**	0,248	0,000	Valid
X _{1.3}	0,684**	0,248	0,000	Valid
X _{1.4}	0,477**	0,248	0,000	Valid
X _{1.5}	0,546**	0,248	0,000	Valid
X _{1.6}	0,639**	0,248	0,000	Valid
X _{1.7}	0,730**	0,248	0,000	Valid
X _{1.8}	0,600**	0,248	0,000	Valid
X _{1.9}	0,470**	0,248	0,000	Valid
X _{1.10}	0,464**	0,248	0,000	Valid

Sumber: Data Primer yang Diolah, Penulis, 2018.

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa nilai r-hitung dari seluruh item pernyataan lebih dari 0,248 dan nilai sig kurang dari 0,05. Hal ini

sesuai dengan kriteria pengujian, sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh item pernyataan tentang perencanaan anggaran dapat dijadikan sebagai alat ukur yang tepat. Selanjutnya, dilakukan uji reliabilitas terhadap seluruh item pernyataan perencanaan anggaran tanpa terkecuali. Berikut disajikan data terkait hasil uji reliabilitas terhadap variabel perencanaan anggaran:

Tabel 19 Hasil Uji Reliabilitas Variabel Perencanaan Anggaran

<i>Cronbach's Alpha</i>	<i>N of Items</i>
0,780	10

Sumber: Data Primer yang Diolah, Penulis, 2018.

Berdasarkan hasil uji reliabilitas di atas, dapat dilihat bahwa nilai *cronbach's alpha* dari variabel perencanaan anggaran sebesar $0,780 > 0,6$. Hal ini sesuai dengan kriteria pengujian, sehingga dapat disimpulkan bahwa item-item pernyataan tentang perencanaan anggaran dapat digunakan sebagai alat pengukur yang dapat dihandalkan atau dipercaya.

2. Variabel Pelaksanaan Anggaran

Hasil uji validitas terhadap item pernyataan tentang pelaksanaan anggaran dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 20 Hasil Uji Validitas Variabel Pelaksanaan Anggaran

Item	r-hitung (<i>Pearson Correlation</i>)	r-tabel (61, 0,5%)	Sig. (2-tailed)	Keterangan
X _{2.1}	0,582**	0,248	0,000	Valid
X _{2.2}	0,558**	0,248	0,000	Valid
X _{2.3}	0,749**	0,248	0,000	Valid
X _{2.4}	0,664**	0,248	0,000	Valid
X _{2.5}	0,401**	0,248	0,001	Valid
X _{2.6}	0,702**	0,248	0,000	Valid

Sumber: Data Primer yang Diolah, Penulis, 2018.

Berdasarkan tabel 20, dapat dilihat bahwa nilai r-hitung dari seluruh item pernyataan lebih dari 0,248 dan nilai sig kurang dari 0,05. Hal ini sesuai dengan kriteria pengujian, sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh item pernyataan tentang pelaksanaan anggaran dapat dijadikan sebagai alat ukur yang tepat. Selanjutnya, dilakukan uji reliabilitas terhadap seluruh item pernyataan pelaksanaan anggaran tanpa terkecuali. Berikut disajikan data terkait hasil uji reliabilitas terhadap variabel pelaksanaan anggaran:

Tabel 21 Hasil Uji Reliabilitas Variabel Pelaksanaan Anggaran

<i>Cronbach's Alpha</i>	<i>N of Items</i>
0,631	6

Sumber: Data Primer yang Diolah, Penulis, 2018.

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa nilai *cronbach's alpha* dari variabel pelaksanaan anggaran sebesar $0,631 > 0,6$. Hal ini sesuai dengan kriteria pengujian, sehingga dapat disimpulkan bahwa item-item pernyataan tentang pelaksanaan anggaran dapat digunakan sebagai alat pengukur yang dapat diandalkan atau dipercaya.

3. Variabel Pertanggungjawaban Anggaran

Hasil uji validitas terhadap item pernyataan tentang pertanggungjawaban anggaran dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 22 Hasil Uji Validitas Variabel Pertanggungjawaban Anggaran

Item	r-hitung (<i>Pearson Correlation</i>)	r-tabel (61, 0,5%)	Sig. (2-tailed)	Keterangan
X _{3.1}	0,762**	0,248	0,000	Valid
X _{3.2}	0,818**	0,248	0,000	Valid
X _{3.3}	0,783**	0,248	0,000	Valid

Sumber: Data Primer yang Diolah, Penulis, 2018.

Berdasarkan tabel 22, dapat dilihat bahwa nilai r-hitung dari seluruh item pernyataan lebih dari 0,248 dan nilai sig kurang dari 0,05. Hal ini sesuai dengan kriteria pengujian, sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh item pernyataan tentang pertanggungjawaban anggaran dapat dijadikan sebagai alat ukur yang tepat. Selanjutnya, dilakukan uji reliabilitas terhadap seluruh item pernyataan pertanggungjawaban anggaran tanpa terkecuali. Berikut disajikan data terkait hasil uji reliabilitas terhadap variabel pertanggungjawaban anggaran:

Tabel 23 Hasil Uji Reliabilitas Variabel Pertanggungjawaban Anggaran

<i>Cronbach's Alpha</i>	<i>N of Items</i>
0,685	3

Sumber: Data Primer yang Diolah, Penulis, 2018.

Berdasarkan hasil uji reliabilitas di atas, dapat dilihat bahwa nilai *cronbach's alpha* dari variabel pertanggungjawaban anggaran sebesar 0,685 > 0,6. Hal ini sesuai dengan kriteria pengujian, sehingga dapat disimpulkan bahwa pernyataan tentang pertanggungjawaban anggaran dapat digunakan sebagai alat pengukur yang dapat diandalkan atau dipercaya.

4. Variabel Evaluasi Kinerja

Hasil uji validitas terhadap item pernyataan tentang evaluasi kinerja dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 24 Hasil Uji Validitas Variabel Evaluasi Kinerja

Item	r-hitung (<i>Pearson Correlation</i>)	r-tabel (61, 0,5%)	Sig. (2-tailed)	Keterangan
X _{4.1}	0,673**	0,248	0,000	Valid
X _{4.2}	0,695**	0,248	0,000	Valid

Lanjutan Tabel 24. Hasil Uji Validitas Variabel Evaluasi Kinerja

Item	r-hitung (<i>Pearson Correlation</i>)	r-tabel (61, 0,5%)	Sig. (2-tailed)	Keterangan
X4.3	0,736**	0,248	0,000	Valid
X4.4	0,758**	0,248	0,000	Valid

Sumber: Data Primer yang Diolah, Penulis, 2018.

Berdasarkan tabel 24, dapat dilihat bahwa nilai r-hitung dari seluruh item pernyataan lebih dari 0,248 dan nilai sig kurang dari 0,05. Hal ini sesuai dengan kriteria pengujian, sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh item pernyataan tentang evaluasi kinerja dapat dijadikan sebagai alat ukur yang tepat. Selanjutnya, dilakukan uji reliabilitas terhadap seluruh item pernyataan evaluasi kinerja tanpa terkecuali. Berikut disajikan data terkait hasil uji reliabilitas terhadap variabel evaluasi kinerja:

Tabel 25 Hasil Uji Reliabilitas Variabel Evaluasi Kinerja

<i>Cronbach's Alpha</i>	<i>N of Items</i>
0,682	4

Sumber: Data Primer yang Diolah, Penulis, 2018.

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa nilai *cronbach's alpha* dari variabel evaluasi kinerja sebesar $0,682 > 0,6$. Hal ini sesuai dengan kriteria pengujian, sehingga dapat disimpulkan bahwa pernyataan tentang evaluasi kinerja dapat digunakan sebagai alat pengukur yang dapat diandalkan atau dipercaya.

5. Variabel Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Data terkait hasil uji validitas terhadap item pernyataan tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dapat dilihat pada tabel 26.

Tabel 26 Hasil Uji Validitas Variabel Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Item	r-hitung (<i>Pearson Correlation</i>)	r-tabel (61, 0,5%)	Sig. (2-tailed)	Keterangan
Y _{1.1}	0,360**	0,248	0,004	Valid
Y _{1.2}	0,337**	0,248	0,007	Valid
Y _{1.3}	0,605**	0,248	0,000	Valid
Y _{1.4}	0,468**	0,248	0,000	Valid
Y _{1.5}	0,461**	0,248	0,000	Valid
Y _{1.6}	0,452**	0,248	0,000	Valid
Y _{1.7}	0,641**	0,248	0,000	Valid
Y _{1.8}	0,614**	0,248	0,000	Valid
Y _{1.9}	0,689**	0,248	0,000	Valid
X _{1.10}	0,464**	0,248	0,000	Valid

Sumber: Data Primer yang Diolah, Penulis, 2018.

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa nilai r_{hitung} dari seluruh item pernyataan lebih dari 0,248 dan nilai sig kurang dari 0,05. Hal ini sesuai dengan kriteria pengujian, sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh item pernyataan tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dapat dijadikan sebagai alat ukur yang tepat. Selanjutnya, dilakukan uji reliabilitas terhadap seluruh item pernyataan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah tanpa terkecuali. Berikut disajikan data terkait hasil uji reliabilitas terhadap variabel akuntabilitas kinerja instansi pemerintah:

Tabel 27 Hasil Uji Reliabilitas Variabel Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

<i>Cronbach's Alpha</i>	<i>N of Items</i>
0,660	9

Sumber: Data Primer yang Diolah, Penulis, 2018.

Berdasarkan hasil uji reliabilitas di atas, dapat dilihat bahwa nilai *cronbach's alpha* dari variabel akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

sebesar $0,660 > 0,6$. Hal ini sesuai dengan kriteria pengujian, sehingga dapat disimpulkan bahwa pernyataan tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dapat digunakan sebagai alat pengukur yang dapat diandalkan atau dipercaya.

F. Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah seluruh variabel bebas dan variabel terikat dalam model regresi berdistribusi secara normal atau tidak. Jika nilai signifikansi $> 0,05$, maka residual menyebar normal. Model regresi yang baik adalah yang memiliki distribusi data normal. Uji normalitas pada penelitian ini menggunakan teknik *Kolmogorov-Smirnov Goodness of Fit Test* yang dilakukan dengan menggunakan analisis *One-Sample Kolmogorov Smirnov Test* pada *software SPSS v. 23.0*. Hasil uji normalitas dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 28 Uji Normalitas

	<i>Unstandardized Residual</i>
N	63
<i>Test Statistic</i>	0,48
<i>Asymp. Sig. (2-tailed)</i>	0,200

Sumber: Data Primer yang Diolah, Penulis, 2018.

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa nilai *Asymp.Sig. (2-tailed)* sebesar $0,200 > 0,05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa residual telah memenuhi asumsi distribusi normal.

2. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya variabel bebas yang memiliki kemiripan antar variabel bebas dalam suatu model. Model regresi yang baik seharusnya tidak terdapat korelasi di antara variabel bebas karena multikolinieritas dapat menyebabkan bias hasil penelitian, terutama dalam proses pengambilan keputusan. Cara yang digunakan untuk mendeteksi gejala multikolinieritas yaitu dengan melihat VIF (*Variance Inflation Factor*) dan nilai *tolerance*. Jika nilai VIF 1-10 dan nilai *tolerance* > 0,1, maka tidak terjadi multikolinieritas. Berikut disajikan data terkait hasil uji multikolinieritas:

Tabel 29 Uji Multikolinieritas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
Perencanaan Anggaran	0,919	1,088
Pelaksanaan Anggaran	0,825	1,211
Pertanggungjawaban Anggaran	0,855	1,170
Evaluasi Kinerja	0,909	1,101

Sumber: Data Primer yang Diolah, Penulis, 2018.

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa variabel perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, pertanggungjawaban anggaran, dan evaluasi kinerja semuanya terbebas dari multikolinearitas. Hal ini terlihat dari hasil uji multikolinearitas yang menunjukkan bahwa variabel bebas memiliki nilai *tolerance* > 0,1 dan VIF diantara 1-10, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel-variabel bebas yang digunakan pada penelitian ini dapat digunakan untuk mengetahui pengaruhnya terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik yaitu homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas dilakukan dengan menggunakan uji *glesjer* yaitu dengan cara meregresikan nilai absolute residual dengan variabel-variabel bebas dalam model. Ketentuan pengujiannya yaitu jika signifikansi $> 0,05$, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Hasil uji *glesjer* dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 30 Uji Glesjer

Variabel Bebas	Sig	Keterangan
Perencanaan Anggaran	0,055	Tidak terjadi heteroskedastisitas
Pelaksanaan Anggaran	0,508	Tidak terjadi heteroskedastisitas
Pertanggungjawaban Anggaran	0,457	Tidak terjadi heteroskedastisitas
Evaluasi Kinerja	0,589	Tidak terjadi heteroskedastisitas

Sumber: Data Primer yang Diolah, Penulis, 2018.

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa nilai signifikansi dari seluruh variabel bebas $> 0,05$, hal ini menunjukkan bahwa tidak adanya hubungan antara seluruh variabel bebas terhadap nilai absolute residual, sehingga dapat disimpulkan bahwa asumsi tidak terjadi heteroskedastisitas dalam model regresi terpenuhi.

G. Uji Regresi Linier Berganda

Uji regresi linier berganda dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat secara bersama-sama dapat dihitung melalui

suatu persamaan regresi berganda. Berikut disajikan data terkait hasil uji regresi linier berganda:

Tabel 31 Uji Regresi Linier Berganda

Model		Unstandardized Coefficients	
		B	Std. Error
1	(Constant)	0,455	3,593
	Perencanaan Anggaran	0,175	0,055
	Pelaksanaan Anggaran	0,264	0,088
	Pertanggungjawaban Anggaran	0,679	0,177
	Evaluasi Kinerja	0,888	0,109

Sumber: Data Primer yang Diolah, Penulis, 2018.

Berdasarkan tabel di atas, diperoleh rumus regresi sebagai berikut:

$$Y = 0,455 + 0,175 X_1 + 0,264 X_2 + 0,679 X_3 + 0,888 X_4$$

Berdasarkan rumus persamaan regresi tersebut, konstanta (β_0) sebesar 0,455. Hal ini menunjukkan jika variabel perencanaan anggaran (X_1), pelaksanaan anggaran (X_2), pertanggungjawaban anggaran (X_3), dan evaluasi kinerja (X_4) bernilai 0, maka akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kabupaten Sidoarjo sebesar 0,455. Hasil uji regresi linier berganda untuk variabel bebas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Nilai koefisien perencanaan anggaran (X_1) sebesar 0,175. Hal ini mengandung arti bahwa setiap kenaikan perencanaan anggaran satu satuan, maka variabel akuntabilitas kinerja instansi pemerintah naik sebesar 0,175 dengan asumsi bahwa variabel bebas yang lainnya tetap.
- b. Nilai koefisien pelaksanaan anggaran (X_2) sebesar 0,264. Hal ini mengandung arti bahwa setiap kenaikan pelaksanaan anggaran satu satuan, maka variabel akuntabilitas kinerja instansi pemerintah naik sebesar 0,264

dengan asumsi bahwa variabel bebas yang lainnya tetap.

- c. Nilai koefisien pertanggungjawaban anggaran (X_3) sebesar 0,679. Hal ini mengandung arti bahwa setiap kenaikan pertanggungjawaban anggaran satu satuan, maka variabel akuntabilitas kinerja instansi pemerintah naik sebesar 0,679 dengan asumsi bahwa variabel bebas yang lainnya tetap.
- d. Nilai koefisien evaluasi kinerja (X_4) sebesar 0,888. Hal ini mengandung arti bahwa setiap kenaikan evaluasi kinerja satu satuan, maka variabel akuntabilitas kinerja instansi pemerintah naik sebesar 0,888 dengan asumsi bahwa variabel bebas yang lainnya tetap.

H. Koefisien Determinasi (R^2)

Analisis koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, pertanggungjawaban anggaran, dan evaluasi kinerja terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Data terkait koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 32 Koefisien Determinasi (R^2)

Model	R	<i>R Square</i>	<i>Adjusted R Square</i>	<i>Std. Error of the Estimate</i>
1	0,847	0,718	0,698	1,08136

Sumber: Data Primer yang Diolah, Penulis, 2018.

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa nilai *R square* yang diperoleh yaitu sebesar 0,718. Angka tersebut menandakan bahwa sebesar 71,8% akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kabupaten Sidoarjo dapat dijelaskan dengan variabel perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran,

pertanggungjawaban anggaran, dan evaluasi kinerja, sedangkan sisanya sebesar 28,2% dipengaruhi oleh faktor lain diluar model regresi ini.

I. PENGUJIAN HIPOTESIS

1. Uji-F

Uji-F digunakan untuk menguji kelayakan model regresi dalam melakukan analisis hipotesis penelitian. Ketentuannya adalah jika signifikansi $< 0,05$, maka dapat dinyatakan bahwa model regresi layak digunakan dalam pengujian hipotesis penelitian. Selain itu, uji-F juga digunakan untuk menguji apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, pertanggungjawaban anggaran, dan evaluasi kinerja terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah secara bersama-sama. Ketentuan pengujiannya adalah jika $F\text{-hitung} > F\text{-tabel}$ (2,531), maka perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, pertanggungjawaban anggaran, dan evaluasi kinerja secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Uji-F pada penelitian ini dilakukan dengan pengujian *ANOVA* pada *software SPSS v. 23.0*. Berikut disajikan data terkait hasil pengujian *ANOVA*:

Tabel 33 *ANOVA*

	Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig
1	<i>Regression</i>	172.591	4	43.148	36.899	0,000
	<i>Residual</i>	67.822	58	1.169		
	Total	240.413	62			

Sumber: Data Primer yang Diolah, Penulis, 2018.

Berdasarkan tabel di atas, hasil perhitungan *ANOVA* menghasilkan tingkat

signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$. Hal ini sesuai dengan kriteria pengujian, sehingga model regresi layak digunakan dalam memprediksi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Selain itu, perhitungan *ANOVA* menghasilkan F-hitung sebesar $36,899 > 2,531$, sehingga dapat disimpulkan bahwa perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, pertanggungjawaban anggaran, dan evaluasi kinerja secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Jika perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, pertanggungjawaban anggaran dan evaluasi kinerja secara bersama-sama meningkat, maka akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kabupaten Sidoarjo juga akan meningkat.

4. Uji-t

Pengujian secara parsial atau uji-t dilakukan untuk menentukan apakah variabel perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, pertanggungjawaban anggaran, dan evaluasi kinerja berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah secara parsial. Hasil uji-t dapat dilihat pada tabel *coefficients* di bawah ini:

Tabel 34 *Coefficients*

Model		T	Sig
1	(Constant)	0,127	0,900
	Perencanaan Anggaran	3,161	0,003
	Pelaksanaan Anggaran	3,009	0,004
	Pertanggungjawaban Anggaran	3,832	0,000
	Evaluasi Kinerja	8,143	0,000

Sumber: Data Primer yang Diolah, Penulis, 2018.

Penjelasan hasil uji-t berdasarkan tabel di atas akan dijelaskan pada halaman selanjutnya.

a. Variabel Perencanaan Anggaran

Variabel perencanaan anggaran pada tabel di atas, menunjukkan nilai t-hitung sebesar 3,161 yang memiliki arti bahwa t-hitung bernilai positif. Nilai t-hitung > t-tabel (2,00172). Selain itu, nilai signifikansi menunjukkan hasil sebesar $0,003 < 0,05$, sehingga H_0 ditolak dan H_1 diterima. Kesimpulan hasil uji-t atas variabel perencanaan anggaran adalah perencanaan anggaran berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

b. Variabel Pelaksanaan Anggaran

Variabel pelaksanaan anggaran pada tabel 35, menunjukkan nilai t-hitung sebesar 3,009 yang memiliki arti bahwa t-hitung bernilai positif. Nilai t-hitung > t-tabel (2,00172). Selain itu, nilai signifikansi menunjukkan hasil sebesar $0,004 < 0,05$, sehingga H_0 ditolak dan H_2 diterima. Kesimpulan hasil uji-t atas variabel pelaksanaan anggaran adalah pelaksanaan anggaran berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

c. Variabel Pertanggungjawaban Anggaran

Variabel pertanggungjawaban anggaran pada tabel 35, menunjukkan nilai t-hitung sebesar 3,832 yang memiliki arti bahwa t-hitung bernilai positif. Nilai t-hitung > t-tabel (2,00172). Selain itu, nilai signifikansi menunjukkan hasil sebesar $0,000 < 0,05$, sehingga H_0 ditolak dan H_3 diterima. Kesimpulan hasil uji-t atas variabel pertanggungjawaban anggaran adalah pertanggungjawaban anggaran berpengaruh signifikan terhadap

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

d. Variabel Evaluasi Kinerja

Variabel evaluasi kinerja pada tabel 35, menunjukkan nilai t-hitung sebesar 8,143 yang memiliki arti bahwa nilai t-hitung bernilai positif. Nilai t-hitung > t-tabel (2,00172). Selain itu, nilai signifikansi menunjukkan hasil sebesar $0,000 < 0,05$, sehingga H_0 ditolak dan H_4 diterima. Kesimpulan hasil uji-t atas variabel evaluasi kinerja adalah evaluasi kinerja berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

J. Pembahasan

1. Pengaruh Perencanaan Anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan hasil uji-t yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa t-hitung perencanaan anggaran sebesar 3,161 dengan nilai signifikansi sebesar $0,003 < 0,05$ yang memiliki arti bahwa perencanaan anggaran berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kabupaten Sidoarjo, dimana ketika perencanaan anggaran yang dilakukan semakin baik, maka semakin baik pula akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, diantaranya yaitu sebagai berikut: Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Ahmari (2014) yang berjudul “Pengaruh Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengendalian Anggaran terhadap Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Kepulauan Mentawai” hasil penelitian

menunjukkan bahwa perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, dan pengendalian anggaran berpengaruh signifikan terhadap kinerja SKPD Kabupaten Kepulauan Mentawai. Kedua, oleh Wibisono (2016) dengan judul “Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi pada Kota Surabaya)” hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan anggaran berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kota Surabaya.

Hasil penelitian ini juga didukung dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang menyatakan bahwa penyelenggaraan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah dimulai dari penyusunan rencana strategis yang merupakan tahap awal dari perencanaan anggaran. Rencana strategis merupakan dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah yang terdiri dari visi, misi, tujuan, dan sasaran serta strategi yang akan digunakan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam suatu pemerintahan, sehingga jika visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi disusun dengan baik, maka akuntabilitas kinerja suatu pemerintahan juga akan baik. Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh peneliti, penyusunan rencana strategis pada instansi pemerintah Kabupaten Sidoarjo telah berpedoman pada visi dan misi yang telah ditetapkan, dibuktikan dengan sebagian besar responden menyatakan setuju dan sisanya menyatakan sangat setuju atas pernyataan tersebut.

Selain itu, hasil penelitian ini diperkuat oleh teori Mardiasmo (2009: 61), bahwa perencanaan anggaran menjadi sangat penting karena ketidaktepatan

dan ketidakefektifan perencanaan anggaran dapat menggagalkan pencapaian tujuan, kinerja instansi pemerintah daerah akan rendah atau tidak baik sehingga menyebabkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah menurun. Perencanaan anggaran instansi pemerintah Kabupaten Sidoarjo secara keseluruhan sudah sangat baik, dimana perencanaan anggaran sudah sesuai dengan pedoman yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Hal ini tercermin dari hasil analisis jawaban responden atas item-item pernyataan tentang perencanaan anggaran, dimana nilai mean pada setiap item masuk kategori sangat baik.

Kemudian, hasil penelitian ini didukung dengan teori yang dihasilkan oleh Ashari (2013:33-34), bahwa komponen yang harus diperhatikan dalam perencanaan anggaran adalah rencana pembangunan jangka menengah, rencana strategis, rencana kerja, program dan kegiatan, indikator kinerja, dan alokasi anggaran. Semua komponen tersebut telah dijalankan dengan sangat baik oleh instansi pemerintah di Kabupaten Sidoarjo, dimana penyusun perencanaan anggaran telah: a. Berpedoman pada rencana pembangunan jangka menengah daerah, b. Penyusunan rencana strategis satuan kerja perangkat daerah berpedoman pada visi dan misi, c. Penyusunan rencana kerja telah berpedoman pada rencana strategis, d. Penyusunan program telah berpedoman pada rencana strategis, e. Penyusunan kegiatan berpedoman pada rencana kerja, f. *Output* dan *outcome* telah ditetapkan dengan jelas dan mendukung program serta kegiatan, g. Penyusunan indikator kinerja utama program telah mengacu pada *outcome*, h. Penyusunan indikator kinerja kegiatan telah mengacu pada *output*,

i. Penyusunan alokasi anggaran telah berpedoman pada indikator kinerja yang harus dicapai, dan j. Penyusunan alokasi anggaran telah berpedoman pada standar biaya. Kemudian, dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah juga menyebutkan bahwa dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah digunakan sebagai landasan penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Berdasarkan analisis yang telah dipaparkan, dapat ditarik kesimpulan bahwa perencanaan anggaran instansi pemerintah Kabupaten Sidoarjo sudah baik, sehingga berdampak juga pada akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang baik.

2. Pengaruh Pelaksanaan Anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Berdasarkan hasil uji-t yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa t-hitung pelaksanaan anggaran sebesar 3,009 dengan nilai signifikansi sebesar $0,004 < 0,05$ yang memiliki arti bahwa pelaksanaan anggaran berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Ketika pelaksanaan anggaran dilakukan semakin baik, maka semakin baik pula akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hasil penelitian sejalan dengan penelitian-penelitian sebelumnya diantaranya yaitu: Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Ahmari (2014) yang berjudul “Pengaruh Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengendalian Anggaran terhadap Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Kepulauan Mentawai”, hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, dan

pengendalian anggaran berpengaruh signifikan terhadap kinerja SKPD Kabupaten Kepulauan Mentawai. Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Friska (2015) yang berjudul “Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Akuntabilitas Kinerja dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderating (Studi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jambi)”, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi anggaran berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Provinsi Jambi. Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Wibisono (2016) dengan judul “Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi pada Kota Surabaya)”, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi anggaran berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kota Surabaya.

Selain itu, hasil penelitian ini juga sejalan dengan teori Halim (2007:178), bahwa tujuan pelaksanaan anggaran adalah untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja unit dalam melaksanakan tugas dan pengelolaan anggaran. Pernyataan tersebut mengisyaratkan bahwa pelaksanaan anggaran yang baik dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Baik atau buruknya pelaksanaan anggaran bisa dilihat dari kedisiplinan penggunaan anggaran sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pelaksanaan anggaran yang terdiri dari pelaksanaan anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan tersebut menyebutkan bahwa pelaksanaan anggaran oleh kepala

satuan kerja perangkat daerah dilaksanakan setelah dokumen pelaksanaan anggaran ditetapkan oleh pejabat pengelola keuangan daerah dengan persetujuan sekretaris daerah, yang mengisyaratkan bahwa pelaksanaan anggaran harus dilaksanakan sesuai dengan dokumen pelaksanaan anggaran. Seluruh instansi pemerintah Kabupaten Sidoarjo telah melaksanakan anggaran sesuai dengan dokumen pelaksanaan anggaran, dibuktikan dengan nilai mean pada pernyataan pelaksanaan anggaran masuk kategori sangat baik.

Keseluruhan pelaksanaan anggaran di instansi pemerintah Kabupaten Sidoarjo telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Penerimaan berupa uang telah disetorkan ke rekening kas umum dalam satu hari kerja, pembayaran belanja anggaran dilakukan setelah barang atau jasa diterima dan sesuai dengan surat penyediaan dana, pemindahbukuan rekening dana cadangan dilakukan berdasarkan rencana pelaksanaan kegiatan. Selain itu, terdapat insentif yang diterima apabila pelaksanaan anggaran berjalan dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan sebagian besar nilai mean atas pernyataan-pernyataan tersebut masuk kategori sangat baik.

Selanjutnya, hasil penelitian ini diperkuat dengan teori Halim (2007:178) yang menyebutkan bahwa tujuan pelaksanaan anggaran adalah untuk meningkatkan efisiensi dalam pelaksanaannya. Penggunaan anggaran di instansi pemerintah Kabupaten Sidoarjo sudah dilaksanakan sesuai dengan prinsip efisiensi dan efektifitas, dibuktikan dengan sebagian besar responden menyatakan setuju dan yang lain menyatakan sangat setuju atas pernyataan

tersebut dan nilai mean yang dihasilkan masuk kategori sangat baik. Berdasarkan paparan di atas, pelaksanaan anggaran instansi pemerintah Kabupaten Sidoarjo sudah baik, sehingga berdampak juga pada akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang baik.

3. Pengaruh Pertanggungjawaban Anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pertanggungjawaban anggaran diawali dengan penyelenggaraan akuntansi atas transaksi keuangan, aset, utang, dan ekuitas dana oleh masing-masing kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku pengguna anggaran. Selanjutnya, kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyiapkan laporan keuangan yang terdiri atas: a. Laporan realisasi anggaran, b. Neraca, dan c. Catatan atas laporan keuangan atas pelaksanaan anggaran dan barang yang dikelolanya. Laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah tersebut oleh pejabat pengelola keuangan daerah disusun laporan keuangan pemerintah daerah yang terdiri atas: a. Laporan realisasi anggaran, b. Neraca, c. Laporan arus kas, dan d. Catatan atas laporan keuangan, disajikan sesuai dengan peraturan pemerintah tentang standar akuntansi pemerintahan, dilampiri dengan laporan ikhtisar realisasi kinerja, dan laporan keuangan badan usaha milik daerah dan perusahaan daerah. Berdasarkan hasil analisis uji-t yang telah dilakukan oleh peneliti, menunjukkan bahwa t-hitung pertanggungjawaban anggaran sebesar 3,832 dengan nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ yang memiliki arti bahwa pertanggungjawaban anggaran

berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Ketika pertanggungjawaban anggaran yang dilakukan semakin baik, maka semakin baik pula akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, diantaranya yaitu sebagai berikut: Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Triuriana (2013) dengan judul “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Empiris pada Kabupaten Jember)”, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa sistem pelaporan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kabupaten Jember. Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Friska (2015) dengan judul “Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Akuntabilitas Kinerja dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderating (Studi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jambi)”, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pelaporan anggaran berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Provinsi Jambi. Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Wibisono (2016) dengan judul “Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi pada Kota Surabaya)”, hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban anggaran berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kota Surabaya.

Selanjutnya, hasil penelitian ini juga sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah yang menyebutkan bahwa tahap kelima dalam siklus akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah pelaporan kinerja yang didalamnya terdapat laporan kinerja beserta laporan keuangan triwulan dan tahunan. Pertanggungjawaban anggaran yang dilakukan dengan baik dan sesuai dengan peraturan dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Pertanggungjawaban anggaran yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah Kabupaten Sidoarjo sudah sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, dimana satuan kerja perangkat daerah telah menyelenggarakan akuntansi atas setiap transaksi keuangan, aset, utang, dan ekuitas. Selain itu, penyusun laporan keuangan telah dibuat sesuai dengan peraturan pemerintah tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, penerbitan pertanggungjawaban anggaran telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan sebagai bentuk dari pertanggungjawaban publik. Hal ini dibuktikan dengan nilai mean yang dihasilkan dari analisis jawaban responden atas pernyataan di atas termasuk dalam kategori sangat baik. Berdasarkan pemaparan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban anggaran instansi pemerintah Kabupaten Sidoarjo sudah baik, sehingga berdampak juga pada akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang baik.

4. Pengaruh Evaluasi Kinerja terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Berdasarkan hasil uji-t yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa t-hitung evaluasi kinerja sebesar 8,143 dengan nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ yang berarti bahwa evaluasi kinerja berpengaruh signifikan terhadap

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hamidi (2014) yang berjudul “Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Akuntabilitas pada RSUD dr. R. Koesma Kabupaten Tuban”, hasil penelitian menunjukkan bahwa evaluasi kinerja berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas RSUD dr. R. Koesma Kabupaten Tuban.

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang menyebutkan bahwa tahap ketiga dalam penyelenggaraan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah pengukuran (evaluasi kinerja). Ketika evaluasi kinerja dilaksanakan dengan baik, maka akuntabilitas kinerja suatu instansi pemerintah juga akan baik. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo telah melakukan evaluasi atas pelaksanaan program dan kegiatan. Evaluasi dilakukan dengan membandingkan realisasi *input* dan *output* kegiatan, serta *outcome* program dengan rencana kegiatan dan program. Hal ini dibuktikan dengan nilai mean yang dihasilkan dari analisis jawaban responden atas pernyataan-pernyataan tersebut masuk dalam kategori sangat baik.

Selanjutnya, hasil penelitian ini diperkuat dengan teori Darwanis (2013:163), agar pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah lebih efektif, sangat diperlukan komitmen yang kuat dari organisasi yang mempunyai wewenang dan bertanggung jawab dibidang pengawasan dan penilaian terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Selain itu, dalam Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003

tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menyebutkan bahwa pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi yang bersangkutan. Seluruh pegawai instansi pemerintah Kabupaten Sidoarjo memiliki komitmen untuk mengelola organisasi sesuai dengan visi, misi dan tujuan satuan kerja perangkat daerah. Selain itu, pada instansi pemerintah Kabupaten Sidoarjo terdapat komitmen untuk menyusun laporan kinerja dengan baik dan terdapat komitmen untuk mempublikasikan hasil laporan kinerja instansi pemerintah pada publik. Hal ini dibuktikan dengan nilai mean yang dihasilkan dari analisis jawaban responden atas pernyataan-pernyataan tersebut masuk dalam kategori sangat baik.

Evaluasi kinerja dilakukan untuk menilai capaian target kinerja pada setiap program maupun kegiatan yang telah dilakukan. Kemudian, hasil evaluasi kinerja tersebut digunakan sebagai dasar penyusunan program dan kegiatan di tahun berikutnya. Hal ini sesuai dengan siklus akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dimana hasil evaluasi dijadikan sebagai alat perbaikan di tahun yang akan datang, sehingga semakin baik evaluasi kinerja yang dilakukan oleh suatu instansi akan semakin baik pula akuntabilitas kinerja pada instansi pemerintah tersebut, karena siklus akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dapat berjalan dengan baik. Evaluasi kinerja yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Sidoarjo dapat mengungkapkan kendala yang terjadi dalam menjalankan program dan kegiatan, sehingga dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun program dan kegiatan. Selain itu, instansi

pemerintah Kabupaten Sidoarjo menjadikan hasil evaluasi sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan program dan kegiatan di tahun berikutnya, dibuktikan dengan nilai mean yang dihasilkan dari analisis jawaban responden atas pernyataan-pernyataan tersebut masuk dalam kategori sangat baik.

Hasil evaluasi kinerja diwujudkan dalam bentuk laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo telah membuat laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang sesuai dengan prinsip akuntabilitas, dimana laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah telah menjabarkan tentang: a. Pencapaian visi, misi, hasil, dan manfaat. b. Tingkat pencapaian sasaran dan target kinerja, c. Tingkat keberhasilan program dan kegiatan secara keseluruhan, d. informasi yang jujur, objektif, transparan, dan akurat. Hal ini tercermin dari hasil analisis jawaban responden atas item-item pernyataan tersebut menghasilkan nilai mean pada setiap item masuk kategori sangat baik Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa evaluasi kinerja instansi pemerintah Kabupaten Sidoarjo sudah baik, sehingga berdampak juga pada akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang baik.